

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI RIAU**

Triwulan II - 2007

**Kantor Bank Indonesia
Pekanbaru**

KATA

PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi potret perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau. Terbitan hari ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan di Propinsi Riau pada triwulan II - 2007 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB, Keuangan Daerah, Investasi, dan Ekspor-Import), Inflasi, moneter dan perbankan, sistem pembayaran, serta perkiraan perkembangan ekonomi daerah pada triwulan III - 2007. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Riau, data PMDN dan PMA dari BPI Propinsi Riau serta data dari instansi terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran dan dukungan *supply* data sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, Agustus 2007

BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd

Gatot Sugiono
Pemimpin

	HALAMAN
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1. EVALUASI KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	8
.....	
1. PDRB dari Sisi Permintaan	8
1.1. PDRB Tanpa Migas	8
1.2. PDRB Dengan Migas	11
2. PDRB dari Sisi Penawaran	12
2.1. PDRB Tanpa Migas	12
2.2. PDRB Dengan Migas	17
3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	19
3.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA.....	19
3.2. Peringkat Realisasi PMA dan PMDN.....	21
4. Keuangan Pemerintah Daerah	22
4.1. Realisasi APBD Propinsi Riau Tahun 2007	22
4.2. Posisi Gabungan Keuangan Daerah	24
5. Perkembangan Ekspor – Impor Non Migas	25
5.1. Ekspor Non Migas	26
5.2. Impor Non Migas	28
5.3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas menurut Valuta dan Cara Pembayaran	29

BOKS 1. Investasi PMDN dan PMA Masih Banyak Menghadapi Kendala

BAB 2. EVALUASI PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL	31
.....	
1. Kondisi Umum.....	31
2. Perkembangan dan Faktor Penyebab Inflasi Kota Pekanbaru	32
3. Perkembangan Komponen-komponen Inflasi di Kota Pekanbaru.....	37

BOKS 2. Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur di Riau; Langkah Proaktif untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

BAB 3. PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	39
1. Perkembangan Moneter	40
2. Perkembangan Perbankan	41
2.1. Bank Umum	41
2.1.1. Jaringan Kantor	41
2.1.2. Perkembangan Aset	42
2.1.3. Kredit	43
2.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit....	43
2.1.3.2. Konsentrasi Kredit	44
2.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru	47
2.1.3.4. Kualitas Kredit	48
2.1.4. Intermediasi Perbankan	50
2.1.4.1. Perkembangan LDR	50
2.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM.....	51
2.1.5. Kondisi Likuiditas	53
2.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga	53
2.1.5.2. Rasio Alat Liquid	56
2.1.6. Profitabilitas	57

2.1.6.1. Spread Bunga	57
2.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	58
2.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi	60
2.2. Bank Perkreditan Rakyat	60
2.3. Bank Syariah	62
3. Perkembangan Sistem Pembayaran	63
3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	63
3.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar	63
3.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	64
3.1.3. Uang Palsu	65
3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai	65
3.2.1. Kliring	65
3.2.2. Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	66
3.3. Perkembangan Kegiatan Pedangan Valuta Asing	66
3.4. Strategi <i>Cash Centre</i> di Indonesia	67
 BOKS 3. Kebutuhan Masyarakat terhadap Uang Tunai di Riau pada Triwulan II – 2007 Meningkat Cukup Tinggi	
BAB 4. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	68
 Daftar Istilah	x

	HALAMAN
Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	9
Tabel 1.2. Struktur Ekonomi Riau Menurut Komponen Penggunaan Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	10
Tabel 1.3. Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Menurut Komponen Penggunaan Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	12
Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	14
Tabel 1.5. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	15
Tabel 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	17
Tabel 1.7. Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Sampai dengan Triwulan II – 2007 (% ,y-o-y)	18
Tabel 1.8. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Propinsi Riau	19
Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Riau (1 Januari s.d.31 Maret 2007).....	19
Tabel 1.10. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Propinsi Riau	20
Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Riau (1 Januari s.d.31 Maret 2007).....	20
Tabel 1.12. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Sektor di Propinsi Riau (1 Januari s.d.31 Maret 2007).....	21
Tabel 1.13. Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Lokasi Periode Januari s.d. Mei 2007.....	22
Tabel 1.14. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau s.d triwulan II Tahun 2007	23
Tabel 1.15. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau	24
Tabel 1.16. Perkembangan Ekspor-Import Provinsi Riau Periode Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD).....	25

Tabel 1.17.	Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD).....	26
Tabel 1.18.	Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD).....	27
Tabel 1.19.	Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Triwulan II 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD).....	28
Tabel 1.20.	Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau Triwulan II 2006 dan 2007	28
Tabel 1.21.	Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta dan Cara Pembayaran Triwulan II - 2006 dan 2007.....	29
Tabel 1.22.	Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta dan Cara Pembayaran II 2006 dan 2007	30
Tabel 2.1.	Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan II Tahun 2007.....	33
Tabel 2.2.	Perkembangan Komoditas yang Mengalami Deflasi dan Kontribusi Tertinggi selama Triwulan II Tahun 2007.....	34
Tabel 2.3.	Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan II Tahun 2007.....	35
Tabel 3.1.	Perkembangan Bank di Propinsi Riau.....	41
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Propinsi Riau (Juni 2007).....	42
Tabel 3.3.	Data ATM Perbankan Per Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.....	42
Tabel 3.4.	Posisi Kredit di Propinsi Riau.....	44
Tabel 3.5.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II Propinsi Riau	47
Tabel 3.6.	Persetujuan Kredit Baru di Propinsi Riau	48
Tabel 3.7.	NPLs Per Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	49
Tabel 3.8.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	50
Tabel 3.9.	Perkembangan Kredit UMKM di Propinsi Riau	52
Tabel 3.10.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	52
Tabel 3.11.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Propinsi Riau.....	53
Tabel 3.12.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Propinsi Riau	54
Tabel 3.13.	Sebaran DPK Menurut Kepemilikan di Propinsi Riau	54
Tabel 3.14.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	55
Tabel 3.15.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Propinsi Riau	55
Tabel 3.16.	Perkembangan Alat Likuid dan Non Core Deposit.....	56
Tabel 3.17.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Propinsi Riau	61
Tabel 3.18.	Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS di Propinsi Riau	61

Tabel 3.19.	Indikator Kinerja Utama Bank Umum Syariah di Propinsi Riau	62
Tabel 3.20.	Perkembangan Kliring di Propinsi Riau	65
Tabel 3.21.	Perkembangan Transaksi RTGS	66
Tabel 3.22.	Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing	67

HALAMAN

Grafik 1.1.	Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan sampai dengan Triwulan II - 2007.....	11
Grafik 1.2.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas sampai dengan Triwulan II - 2007.....	16
Grafik 1.3.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Sampai dengan Triwulan II - 2007.....	18
Grafik 1.4.	Perkembangan Posisi Gabungan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau.....	25
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru.....	32
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan.....	36
Grafik 2.3.	Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.....	36
Grafik 2.4.	Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi.....	37
Grafik 2.5.	Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan II 2007.....	38
Grafik 3.1.	Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Propinsi Riau	40
Grafik 3.2.	Perkembangan Aset Perbankan Propinsi Riau	43
Grafik 3.3.	Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Propinsi Riau	45
Grafik 3.4.	Jumlah Undisbursed Loans Perbankan di Propinsi Riau	48
Grafik 3.5.	Perkembangan NPLs Gross di Propinsi Riau	49
Grafik 3.6.	Perkembangan LDR di Propinsi Riau	51
Grafik 3.7.	Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit	57
Grafik 3.8.	Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito	58
Grafik 3.9.	Komposisi Pendapatan Bunga	59
Grafik 3.10.	Komposisi Beban Bunga	59
Grafik 3.11.	Perkembangan Laba Rugi	60
Grafik 3.12.	Perkembangan Kas Inflow dan Outflow	64

Memasuki triwulan II – 2007, perekonomian Riau terus menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas sampai dengan triwulan II – 2007 mencapai 7,40% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,28%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 9,67% yang didorong oleh beberapa kegiatan budaya, olahraga dan sosial; diikuti komponen impor sebesar 9,38% yang dipicu oleh permintaan terhadap bahan baku seperti bahan kertas, pupuk dan barang modal, serta komponen PMTB sebesar 9,10%, yang didorong oleh pembangunan infrastruktur, pembangunan properti (bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal) serta pembelian mesin-mesin dan peralatan yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

Dari sisi penawaran, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 21,65%, yang diperoleh dari peran produksi batu bara di kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu; diikuti sektor keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 11,68% didorong oleh peran sub sektor bank yang tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Selanjutnya sektor pengangkutan

dan komunikasi tumbuh sebesar 9,08% yang didorong oleh meningkatnya pemakaian pulsa oleh pengguna telepon seluler, dan meningkatnya jumlah penumpang terutama baik untuk keperluan dinas maupun bisnis.

Sementara itu, dengan memperhitungkan migas pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II – 2007 tercatat sebesar 4,41% mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73%. Dari sisi permintaan, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,38%, yang didorong oleh meningkatnya investasi peralatan dan infrastruktur dalam upaya pencarian sumur-sumur minyak produksi baru di berbagai daerah seperti Pekanbaru, Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir. Pertumbuhan komponen ekspor tercatat sebesar 4,59%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya pertumbuhan komponen impor tercatat sebesar 8,03%, juga mengalami perlambatan yang diperkirakan berkaitan dengan menurunnya kegiatan produksi migas.

Dari sisi penawaran, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,40%, mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,22% sebagai dampak penurunan volume produksi migas. Sedangkan sektor industri pengolahan mencapai 6,87% meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,71%. Dilihat dari struktur perekonomian Riau, sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 41,81%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,83% dan industri pengolahan sebesar 19,70%.

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai triwulan I - 2007, berdasarkan laporan persetujuan dan realisasi investasi PMDN dari Badan Promosi dan Investasi propinsi Riau terdapat 1 (satu) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar Rp.124,40 miliar. Sementara realisasi tercatat sebesar Rp.1.867,80 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 3 (tiga) proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11.823 orang. Realisasi tersebut diperkirakan berasal dari persetujuan proyek tahun-tahun sebelumnya.

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 1 (satu) kabupaten yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Rokan Hilir sebesar Rp.115 Miliar dan 1 (satu) kabupaten yang memperoleh perluasan proyek yaitu Kampar sebesar Rp.9,4 Miliar. Dari kedua proyek tersebut diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 268 orang. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing

(PMA) terdapat 7 (tujuh) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar USD2.013 juta, sedangkan realisasi tercatat sebesar USD392,4 juta yang berasal dari realisasi 1 (satu) proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 254 orang. Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki persetujuan investasi baru yaitu Pelalawan, Pekanbaru dan Dumai, serta 3 (tiga) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan perluasan investasi yaitu Pelalawan, Siak dan Dumai.

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor di propinsi Riau, terdapat 4 (empat) sektor ekonomi yang masing-masing memperoleh investasi baru, perluasan dan alih status. Sektor yang mendapat persetujuan investasi baru yaitu industri makanan, industri kimia, perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan persetujuan perluasan investasi yaitu sektor industri kertas, industri kimia, industri lainnya, serta listrik dan air. Sementara sektor yang mengalami alih status yaitu sektor perkebunan, industri makanan, perdagangan dan jasa.

Pada sisi keuangan pemerintah daerah yang terdapat di perbankan (konsolidasi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota) sampai dengan triwulan II - 2007 mencapai Rp.8.775,54 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 7% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.8.208,86 miliar.

Perkembangan ekspor impor non migas provinsi Riau sampai dengan triwulan II – 2007 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor non migas mencapai USD2.558,14 juta, sementara impor non migas mencapai USD835 juta. Komoditas minyak dan lemak nabati merupakan ekspor non migas terbesar dari provinsi Riau dengan nilai sebesar USD1.550,71 juta atau 60,62% dari total ekspor, diikuti ekspor kelompok kertas yang tercatat sebesar USD412,82 juta atau 16,14%, dan ekspor pulp dan kertas sebesar USD372,54 juta atau 12,64%. Sementara impor non migas terbesar adalah mesin industri tertentu dengan nilai impor mencapai USD343,53 juta atau 41,11% dari total impor, diikuti mesin industri dan perlengkapannya yang mencapai USD97,57 juta atau 11,68%, besi dan baja sebesar USD62,25 juta atau 7,47%. Peningkatan impor tersebut sebagian besar merupakan bahan baku sehingga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap ekspor pada periode yang akan datang. Dilihat dari negara tujuan ekspor, Singapura menempati urutan pertama dengan total nilai ekspor

sebesar USD 1.304,08 juta (50,98%), dan juga urutan pertama sebagai negara asal barang impor dengan total mencapai USD 368,35 juta (44,08%).

Pada triwulan laporan, Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar -1,50% (deflasi), lebih rendah dibandingkan dengan IHK pada triwulan sebelumnya sebesar 3,67%, dan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,89%. Secara tahunan, inflasi IHK mencapai 6,84%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 15,67%. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi tertinggi yaitu sebesar 4,58%; diikuti oleh kelompok sandang sebesar 0,93%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,71%. Sementara kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi yaitu sebesar 0,49% diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,21%; kelompok kesehatan, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,15%. Dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kelompok barang dan jasa, kelompok bahan makanan memberikan sumbangan tertinggi terhadap deflasi, yaitu sebesar 1,34%, diikuti oleh kelompok perumahan (perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar) sebesar 0,16%, sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi yaitu sebesar 0,05% diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,04%; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01%.

Deflasi yang terjadi pada triwulan II - 2007 disebabkan oleh tersedianya pasokan yang mencukupi baik yang berasal dari propinsi lain maupun impor dari negara lain, sehingga terjadi koreksi terhadap kenaikan harga yang cukup tinggi pada periode sebelumnya, terutama pada kelompok bahan makanan. Melihat besarnya pengaruh kelompok bahan makanan terhadap laju inflasi di propinsi Riau, maka program mandiri pangan yang dicanangkan oleh Pemda Riau perlu segera direalisasikan dan mendapat dukungan semua pihak.

Berdasarkan determinan, perkembangan komponen inflasi *volatile food*, *administered price* dan inflasi inti menunjukkan penurunan. Laju inflasi *volatile food* mencapai -5,14% menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,82%, *administered price* tercatat sebesar -0,86%, juga menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 8,47%. Sementara itu, laju inflasi inti tercatat sebesar 0,01%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,21%.

Kondisi moneter dan perbankan di Propinsi Riau selama triwulan laporan secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada triwulan laporan menurun dari Rp.7.108.831 juta menjadi Rp.6.918.178 juta, atau turun 2,68%. Posisi uang kuasi dan uang giral (dana pihak ketiga) tercatat Rp.27.278.233 juta atau tumbuh 4,20%. Sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga perbankan, total aset perbankan juga meningkat sebesar 3,72% menjadi Rp.31.641.238 juta. Peningkatan dana pihak ketiga didominasi oleh peningkatan dana jangka pendek sebesar 4,27%, sementara dana jangka panjang mengalami peningkatan yang tidak signifikan (1,10%).

Penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 4,04% sehingga posisi kredit menjadi Rp.14.568.211 juta. Kualitas kredit mengalami perbaikan yang tercermin dari turunnya jumlah *Non Performing Loans* (NPLs) dari Rp.758.199 juta menjadi Rp.620.432 juta. Dengan demikian rasio NPLs *gross* turun dari 5,41% menjadi 4,26%, sementara rasio NPLs *net* meningkat dari 2,51% menjadi 3,11%.

Pangsa kredit untuk kegiatan produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi) sebesar 68,14%, sedikit menurun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang tercatat 69,51%. Berdasarkan sektor ekonomi pangsa kredit terbesar adalah pada sektor pertanian (22,33%), diikuti sektor perdagangan (20,88%) dan sektor industri (11,86%). Kondisi ini searah dengan peranan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB Propinsi Riau.

Jumlah *undisbursed loan* pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan sebesar 22,51% dari Rp.1.032.895 juta menjadi Rp.1.265.437 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya sumber pembiayaan lain (non perbankan) dan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya. Sementara itu perbaikan kondisi ekonomi makro mendorong peningkatan jumlah persetujuan kredit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp.1.835.259 juta menjadi Rp.2.081.577 juta.

LDR perbankan propinsi Riau mengalami sedikit penurunan dari 53,49% pada triwulan sebelumnya menjadi 53,41% pada triwulan laporan. Penurunan tersebut disebabkan pertumbuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, sedangkan LDR berdasarkan lokasi proyek meningkat dari 76,77% menjadi 80,78%. Penyaluran kredit UMKM terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dimana posisi kredit

UMKM pada triwulan laporan mencapai Rp.10.044.830 juta atau 68,95% dari total kredit perbankan Riau, meningkat 11,13% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja perbankan propinsi Riau dilihat dari profitabilitas menunjukkan peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya penyaluran kredit dan menurunnya jumlah beban operasional karena suku bunga deposito menurun. Perolehan laba selama triwulan laporan tercatat Rp.371.212 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.298.108 juta. Seiring dengan penurunan BI rate, suku bunga juga menunjukkan penurunan walaupun belum sebesar yang diharapkan, terutama pada suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Suku bunga kredit (*weighted average*) pada akhir triwulan laporan tercatat 14,29%, turun sebesar 37 basis points (bps), sementara suku bunga deposito 3 bulan tercatat 7,77%, atau turun sebesar 36 bps.

Perkembangan kegiatan pembayaran tunai pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp.2.109,73 miliar atau meningkat 230,83% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu aliran uang kartal masuk (*inflow*) mengalami penurunan dari Rp.390,38 miliar menjadi Rp.129,77 miliar pada triwulan laporan. Hal ini terkait adanya kebijakan Bank Indonesia melakukan uji coba kegiatan penyetoran dan pengambilan uang, dimana bank hanya diperbolehkan melakukan setoran terhadap Uang yang Tidak Layak Edar (UTLE).

Dari sisi kegiatan pembayaran non tunai, jumlah warkat yang dikliringkan pada periode laporan mencapai 235.998 lembar naik 0,5% dibanding triwulan sebelumnya sedangkan jumlah nominal turun 0,21% dari Rp.4.572.287 juta menjadi Rp.4.562.529 juta pada triwulan laporan. Sementara itu persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong per hari pada periode laporan berdasarkan jumlah warkat sebesar 0,65%, sedangkan berdasarkan nominal sebesar 0,52% per hari atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam tiwulan laporan tercatat sebesar Rp.67,64 triliun terdiri dari RTGS masuk sebesar Rp 45,15 triliun dan RTGS keluar sebesar Rp 22,49 triliun. Hingga periode laporan PVA yang melakukan kegiatan usaha diwilayah kerja KBI Pekanbaru tercatat 18 perusahaan, dengan nilai penjualan mencapai USD 3.241 ribu dan pembelian mencapai USD 3.216 ribu.

TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
PROPINSI RIAU (DARATAN)

INDIKATOR	2006			2007	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
MAKRO					
Laju Inflasi (q-t-q)	0.89%	1.21%	3.34%	3.67%	-1.50%
Laju Inflasi (y-o-y)	15.67%	13.75%	6.32%	9.42%	6.84%
Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa :					
- Bahan Makanan	0.95%	2.44%	7.96%	4.00%	-4.58%
- Makanan Jadi	0.36%	0.75%	1.68%	6.24%	0.21%
- Perumahan	0.70%	0.78%	1.56%	4.93%	-0.71%
- Sandang	3.68%	0.21%	2.70%	0.91%	-0.93%
- Kesehatan	1.29%	3.08%	5.40%	2.46%	0.17%
- Pendidikan	0.00%	1.86%	0.08%	1.03%	0.15%
- Transpor	0.25%	-0.01%	0.06%	0.43%	0.49%
Pertumbuhan PDRB (tanpa Migas)-(y-o-y) *)	7.51%	9.59%	10.40%	7.41%	7.40%
Pertumbuhan PDRB (termasuk Migas)-(y-o-y) *)	4.71%	5.44%	5.69%	4.46%	4.41%
Ekspor Non Migas (Juta USD) ¹⁾	1,902	3,132	4,496	1,088	2,558
Impor Non Migas (Juta USD) *)	283	418	558	527	836
MONETER					
Posisi SBI (miliar Rp)	6,618.83	7,346.87	8,255.75	7,108.83	6,918,178
PERBANKAN					
Bank Umum	29	30	31	32	33
- Kantor Bank Pemerintah	165	166	178	181	183
- Kantor Bank Swasta	80	85	91	84	85
- Lainnya **)	14	14	15	36	38
- ATM	271	277	296	304	306
BPR	15	15	15	15	16
Aktiva (miliar Rp) *)	28,310.7	28,527.1	31,829.2	31,509.5	31,641.2
Giro (miliar Rp)	9,729.24	10,329.62	12,165.80	11,165.54	11,001.58
Tabungan (miliar Rp)	6,966.43	7,298.51	9,163.03	8,625.26	9,124.47
Deposito (miliar Rp)	6,589.52	6,631.04	6,324.65	6,388.69	7,152.19
Total DPK (miliar Rp)	23,285.19	23,285.19	27,653.48	26,179.49	27,278.23
Kredit Umum Lokasi Proyek di Riau (miliar Rp)	19,238.38	19,149.18	21,898.60	20,096.77	22,034.49
Kredit Umum oleh Perbankan di Riau (miliar Rp)	13,105.54	13,303.04	13,854.84	14,002.44	14,568.21
UMKM (miliar Rp)	7,910.22	8,306.92	8,733.43	9,038.57	10,044.83
NPLs (%)	10.38%	10.21%	5.20%	5.41%	4.26%
SISTEM PEMBAYARAN					
Inflow (miliar Rp)	1,229.64	1,396.54	771.16	390.68	129.77
Outflow (miliar Rp)	2,504.08	2,856.38	3,569.63	637.70	2,109.73
PTTB (nominal)	91.53	191.55	258.40	94.16	120.41
RTGS :					
- Dari Pekanbaru	21,688.83	21,973.21	29,593.11	45,252.09	22,489.45
- Ke Pekanbaru	39,679.78	46,747.90	60,395.59	70,619.40	45,146.64
Jumlah Uang Palsu (lembar)	38	29	9	22	17
Volume Kliring (lembar)	282,747	259,144	216,919	234,908	235,998
Nominal Kliring (miliar Rp)	4,598.30	4,585.40	4,206.51	4,572.29	4,562.53
KEUANGAN DAERAH					
Posisi Gabungan Saldo Keu.Daerah - Pembiayaan (miliar Rp)	8,208.86	7,988.16	8,810.31	8,717.76	8,775.94

Keterangan :

1). Data Ekspor & Impor adalah data kumulatif

Sumber data dari Bagian PPDI - BI, Jakarta.

*) Angka revisi

Bab 1

EVALUASI KONDISI EKONOMI

MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi propinsi Riau sampai dengan triwulan II-2007 mencapai 7,40% (tanpa migas) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,28%. Naiknya laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut terutama dipicu oleh pesatnya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat yang sampai dengan triwulan II-2007 mencapai Rp.13.855.065,41 juta atau tumbuh 7,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp.12.872.105,80 juta. Secara struktural konsumsi masyarakat tersebut mendominasi pangsa PDRB Riau sebesar 48,59%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dengan migas menunjukkan trend perlambatan. Hal tersebut terkait dengan adanya penurunan produksi di sektor migas.

1. PDRB dari Sisi Permintaan

1.1. PDRB Tanpa Migas

Pertumbuhan ekonomi propinsi Riau sampai dengan triwulan II-2007 sebesar 7,40%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,28%. Menurut penggunaan, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga swasta sebesar 9,67%, diikuti impor 9,38%, PMTB 9,10%, konsumsi pemerintah 8,89%, dan konsumsi rumah tangga 7,64%.

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw II '06**)	Tw III '06**)	Tw IV '06**)	Tw I '07***)	Tw II '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7.38	7.67	7.74	7,71	7.64
	a. Makanan	7.59	7.81	7.88	6,59	6.50
	b. Non Makanan	7.26	7.59	7.66	8,30	8.23
2	Konsumsi Lembaga Swasta	10.59	11.13	11.16	10,22	9.67
3	Konsumsi Pemerintah	11.42	11.52	11.66	9,11	8.89
4	PM TB	9.53	9.42	9.40	10,17	9.10
5	Perubahan Stok	-47.32	-49.40	-45.79	-1,55	-24.24
6	Ekspor	12.51	12.16	11.31	6,67	7.07
	a. Antar Negara	12.56	12.32	11.53	6,66	7.08
	b. Antar Daerah	12.17	10.94	9.68	6,71	7.01
7	Impor	17.42	16.31	14.80	8,99	9.38
	a. Antar Negara	14.09	13.23	12.05	5,25	7.27
	b. Antar Daerah	19.80	18.50	16.74	11,56	10.81
	Total	7.28	8.06	10.40	7,41	7.40

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Komponen konsumsi rumah tangga, tumbuh sebesar 7,64%. Pertumbuhan pada komponen ini dipengaruhi adanya penyesuaian gaji/upah karyawan swasta dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga menjadi salah satu pendorong daya beli dan pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat.

Komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh sebesar 9,67%. Pertumbuhan pada komponen ini terkait dengan adanya beberapa kegiatan budaya, olahraga dan sosial

Komponen konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,89%. Pendorong pertumbuhan pada komponen ini terkait dengan meningkatnya pengeluaran belanja pegawai seperti penyesuaian gaji atau tunjangan pegawai yang cukup besar serta meningkatnya belanja barang modal dan pembiayaan penyusutan barang modal.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 9,10%. Pembangunan infrastruktur, pembangunan properti seperti bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal serta pembelian mesin-mesin dan peralatan yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah merupakan pendorong pertumbuhan pada komponen ini.

Selanjutnya, **komponen ekspor** tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan yang cukup baik ini diperkirakan masih didukung oleh beberapa komoditas andalan seperti CPO, industri kertas, bubur kertas, industri makanan dan minuman, komoditas perikanan, perkebunan dan sayur-sayuran, terutama ekspor antar negara yang tumbuh 7,08% dan ekspor antar daerah 7,01% dengan total nilai ekspor sebesar Rp 9.385.840 Juta.

Sementara, **komponen impor** tumbuh sebesar 9,38%. Berbagai kebutuhan bahan baku seperti bahan kertas, pupuk dan barang modal, serta peralatan elektronik, bahan bangunan, bahan makanan, kendaraan bermotor, jasa kesehatan dan pendidikan yang menjadi pemicu pertumbuhan komponen impor.

Dilihat dari struktur PDRB ekonomi Riau tanpa migas dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 48,59%, yang didukung oleh peran konsumsi non makanan sebesar 31,94% dan konsumsi makanan sebesar 16,64%. Selanjutnya komponen ekspor memberikan kontribusi sebesar 43,77%, dan komponen impor sebesar 28,95%, sehingga terjadi net ekspor sebesar 14,82%.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 19,72%. Hal ini terkait dengan adanya penanaman modal baru untuk pembangunan kegiatan produksi seperti pembukaan lahan baru, pembelian mesin dan peralatan serta pembangunan infrastruktur. Sementara komponen konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 12,16%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 0,49%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Struktur Ekonomi Riau Tanpa Migas Menurut Komponen Penggunaan sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw. II '06**)	Tw. III '06**)	Tw. IV '06**)	Tw. I '07***)	Tw. II '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	47.43	48.22	48.91	48.77	48.59
	a. Makanan	16.05	16.46	16.73	16.48	16.64
	b. Non Makanan	31.39	31.76	32.18	32.29	31.94
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0.49	0.50	0.50	0.50	0.49
3	Konsumsi Pemerintah	12.06	12.18	12.37	12.32	12.16
4	PM TB	19.26	19.59	20.10	20.48	19.72
5	Perubahan Stok	6.50	5.60	4.52	4.03	4.22
6	Ekspor	46.82	46.32	45.73	42.26	43.77
	a. Antar Negara	43.72	43.26	42.71	39.47	40.83
	b. Antar Daerah	3.10	3.06	3.01	2.79	2.94
7	Impor	32.57	32.40	32.11	28.37	28.95
	a. Antar Negara	14.22	14.11	13.96	12.25	12.33
	b. Antar Daerah	18.35	18.29	18.16	16.12	16.62
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

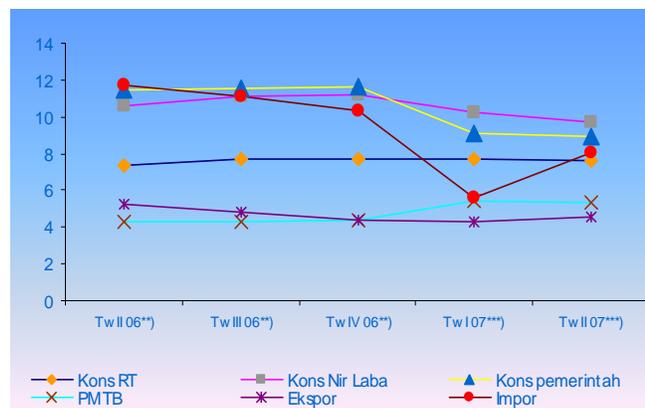
Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

1.2. PDRB dengan Migas

Pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas sampai dengan triwulan laporan sebesar 4,41%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 4,73%. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat yaitu mencapai 5,38%. Peningkatan ini diperkirakan terkait dengan meningkatnya investasi peralatan dan infrastruktur dalam upaya pencarian sumur-sumur produksi baru di berbagai daerah, seperti Pekanbaru, Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Sementara pertumbuhan komponen ekspor tercatat sebesar 4,59%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006. Hal ini diperkirakan karena terjadi penurunan volume produksi migas Riau. Pertumbuhan komponen impor tercatat sebesar 8,03%, juga mengalami perlambatan. Hal ini diperkirakan berkaitan dengan permintaan migas domestik yang relatif masih tinggi seperti bahan bakar untuk industri, listrik, transportasi dan rumah tangga. (lihat grafik 1.2)

Grafik 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Dilihat dari struktur PDRB Propinsi Riau dengan migas menurut sisi penggunaan, kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai 22,32%. Hal ini mencerminkan bahwa peran kegiatan investasi pada seluruh aktivitas perekonomian baik migas maupun non migas tergolong besar. Sementara komponen ekspor memberikan kontribusi sebesar 55,30%, dan komponen impor memberikan kontribusi sebesar 17,39%, sehingga kontribusi ekspor nettonya mencapai 37,91%. Selanjutnya komponen konsumsi

rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu mencapai 27,83%. (lihat tabel 1.3.)

Tabel 1.3. Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Menurut Komponen Penggunaan sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw. II '06**)	Tw. III '06**)	Tw. IV '06**)	Tw. I '07***)	Tw. II '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	27,13	28,20	28,49	27,77	27,89
	a. Makanan	9,19	9,78	9,79	9,38	9,68
	b. Non Makanan	17,95	18,42	18,70	18,38	18,22
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
3	Konsumsi Pemerintah	6,87	7,04	7,23	7,01	6,91
4	P M TB	23,41	23,27	23,27	22,48	22,17
5	Perubahan Stok	5,09	5,59	5,84	4,86	4,53
6	Ekspor	56,71	54,58	53,11	54,92	55,66
	a. Antar Negara	54,09	52,05	50,69	52,55	53,28
	b. Antar Daerah	2,63	2,53	2,42	2,37	2,39
7	Impor	19,50	18,97	18,22	17,32	17,45
	a. Antar Negara	9,01	8,63	8,24	8,11	8,01
	b. Antar Daerah	10,49	10,33	9,99	9,21	9,44
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

2. PDRB Dari Sisi Penawaran

2.1. PDRB Tanpa Migas

Dilihat dari sisi penawaran, terdapat lima sektor ekonomi yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, serta sektor bangunan. Sementara 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran, listrik dan air bersih, serta sektor pertanian mengalami perlambatan.

Sektor **pertambangan dan penggalian** mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 21,65%. Pertumbuhan pada sektor ini diperoleh dari peran produksi batu bara di kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu. Selanjutnya sektor **pengangkutan dan komunikasi** tumbuh sebesar 9,08%. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh sub sektor komunikasi sebesar 18,48% dan sub sektor angkutan udara sebesar 9,52%. Pertumbuhan sub sektor komunikasi disebabkan meningkatnya pemakaian pulsa oleh pengguna telepon seluler. Sementara pertumbuhan pada sub sektor angkutan udara disebabkan meningkatnya jumlah penumpang terutama untuk keperluan dinas maupun bisnis.

Sektor **industri pengolahan** mencatat laju pertumbuhan sebesar 9,05%. Pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor ini terkait dengan meningkatnya produksi industri pabrik kelapa sawit, industri *pulp and paper* serta industri garmen dan mebel.

Sektor **jasa-jasa** mengalami laju pertumbuhan sebesar 9,02%. Pertumbuhan di sektor ini terutama didorong oleh sub sektor jasa pemerintahan sebesar 8,88% dan sub sektor jasa swasta sebesar 9,46%. Pertumbuhan pada sub sektor jasa pemerintahan terkait dengan meningkatnya pengeluaran untuk upah/gaji, insentif, dan penyusutan barang modal. Sementara pertumbuhan pada sub sektor jasa swasta disebabkan meningkatnya jasa sosial kemasyarakatan, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Sektor **bangunan** mencatat laju pertumbuhan sebesar 8,31%. Pertumbuhan di sektor ini terutama disebabkan meningkatnya pembangunan *property* yang telah dan sedang dikembangkan oleh pihak swasta serta pembangunan infrastruktur yang mencakup perluasan gedung perkantoran, penambahan/pelebaran beberapa ruas jalan dan jembatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara sektor **keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan** tumbuh sebesar 11,68%. Peran sub sektor bank masih mendominasi pertumbuhan pada sektor ini yaitu sebesar 20,38%. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit perbankan yang tumbuh sebesar 11,16%.

Selanjutnya, **sektor perdagangan, hotel dan restoran** tumbuh sebesar 9,02%. Pertumbuhan di sektor ini masih didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada sub sektor restoran yaitu mencapai 10,57%. Sementara sub sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 9,01% dan sub sektor hotel tumbuh sebesar 7,74%. Hal ini terkait dengan munculnya pusat perdagangan baru ditambah dengan pola gaya hidup masyarakat Riau yang konsumtif. Disisi lain banyaknya pelatihan-pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta maupun instansi pemerintah di hotel juga menjadi pendorong pertumbuhan pada sub sektor perhotelan.

Sektor **listrik dan air bersih** tumbuh sebesar 5,10%. Kondisi ini terkait dengan selain besarnya beban biaya operasional penyaluran listrik dan juga masih terbatasnya persediaan daya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun industri, yang mengakibatkan sektor ini belum bisa berkembang. Sementara pada sektor air bersih tercermin bahwa kurangnya minat masyarakat memakai air sebagai dampak dari rendahnya kualitas air yang

dihasilkan oleh perusahaan air minum, yang menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan pada sektor ini.

Sektor **pertanian** mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,41%. Pertumbuhan di sektor ini terutama didorong oleh sub sektor peternakan yaitu sebesar 7,19% dan sub sektor perikanan sebesar 7%. Peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada sub sektor peternakan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan produksi daging sapi, kerbau, kambing dan babi, serta daging ayam maupun telur.

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw.II '06**)	Tw.III '06**)	Tw.IV '06**)	Tw.I '07***)	Tw.II '07***)
1	Pertanian	4,72	5,45	5,97	4,27	4,41
2	Pertambangan dan Penggalian	20,61	25,42	28,61	25,28	21,65
3	Industri Pengolahan	6,89	8,15	9,11	9,52	9,05
4	Listrik dan Air Bersih	5,25	5,73	5,86	4,93	5,10
5	Bangunan	6,70	7,47	8,27	8,20	8,31
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,09	11,20	11,29	8,69	9,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,54	9,15	9,62	9,19	9,08
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	12,68	13,96	15,67	11,83	11,68
9	Jasa-jasa	8,70	9,49	9,94	9,04	9,02
	Total	7,28	8,06	8,66	7,41	7,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Dilihat dari struktur ekonomi Propinsi Riau sektoral tanpa migas, kontribusi sektor pertanian masih tetap yang terbesar yaitu mencapai 38,10%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,28%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,74%, jasa-jasa sebesar 5,90%, bangunan sebesar 4,39%, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 3,49%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,23%, pertambangan dan penggalian sebesar 1,52%, dan kontribusi terendah terjadi pada sektor listrik dan air bersih yaitu sebesar 0,34%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	38,30	38,37	38,28	38,64	38,10
2	Pertambangan dan penggalian	1,08	1,22	1,32	1,45	1,52
3	Industri Pengolahan	31,57	31,23	30,84	30,55	31,28
4	Listrik dan air bersih	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34
5	Bangunan	4,29	4,36	4,49	4,32	4,39
6	Perdagangan, hotel dan restoran	11,48	11,57	11,79	11,93	11,74
7	Pengangkutan dan komunikasi	3,39	3,37	3,39	3,28	3,23
8	Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	3,28	3,29	3,31	3,56	3,49
9	Jasa-jasa	6,25	6,23	6,23	5,93	5,90
	Total	100,00	#VALUE!	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi cukup tinggi di sektor pertanian yaitu sebesar 19,71% terhadap total pembentukan PDRB Propinsi Riau. Hal ini diperkirakan sebagai dampak meningkatnya produksi kelapa sawit sehingga menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Komoditas karet dan kelapa juga memberikan kontribusi yang cukup besar karena memiliki area yang cukup luas dan produksinya relatif baik. Selain itu, sub sektor kehutanan juga memberikan kontribusi cukup besar mencapai 12,01%. Hal ini diperkirakan meningkatnya harga komoditas kayu sehingga menghasilkan nilai tambah pada sub sektor ini.

Sementara, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 31,28%. Peran beberapa perusahaan industri *pulp and paper* masih menjadi penopang utama perkembangan industri pengolahan di Riau, diikuti oleh peran industri makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, mulai berkembangnya industri garmen dan mebel di Riau sedikitnya telah mampu meningkatkan nilai tambah sektor industri.

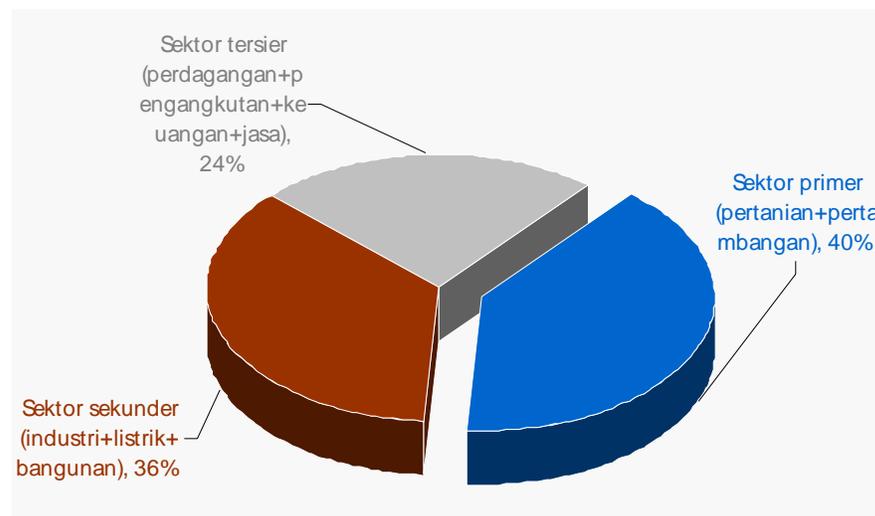
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 11,74%, dimana peran subsektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi yaitu sebesar 10,86%. Kontribusi yang cukup besar ini terkait semakin pesatnya transaksi jual beli yang ditunjang oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil terutama untuk pembelian produk tahan lama seperti kendaraan bermotor roda dua dan empat serta barang elektronik seperti TV, radio, komputer, dan telepon genggam.

Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 5,90%. Sektor ini terutama didukung oleh peran sub sektor pemerintahan umum yang dihasilkan melalui penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah/gaji, insentif serta penyusutan barang modal yang relatif membaik. Sedangkan sektor bangunan yang merupakan penunjang infrastruktur sektor lainnya memberi kontribusi sebesar 4,39%

Selanjutnya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 3,49%, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,23%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,52%. Kontribusi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperoleh melalui tumbuhnya jasa penyewaan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti perkantoran dan usaha, serta perluasan peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara, kontribusi pada sektor pengangkutan dan komunikasi didorong oleh sub sektor pengangkutan seperti bertambahnya armada angkutan darat, laut, dan udara serta peningkatan jaringan telepon seluler.

Kontribusi terendah terdapat pada sektor listrik dan air bersih yaitu sebesar 0,34%. Hal ini disebabkan masih minimnya investasi di sektor ini, sehingga menjadi masalah utama dalam pembangunan di Propinsi Riau.

Grafik 1.2. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas sampai dengan Triwulan II - 2007 (%)



2.2. PDRB dengan Migas

Sampai dengan triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas mencapai 4,41%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,73%. Sektor-sektor yang merupakan unsur migas yaitu sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,40%, mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 3,22%. Sedangkan sektor industri pengolahan mencapai 6,87%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,71%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas sampai dengan Triwulan II - 2007 (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	4,72	5,45	5,97	4,27	4,41
2	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,04	2,91	2,50	2,40
3	Industri Pengolahan	4,71	5,91	6,78	7,43	6,87
4	Listrik dan Air Bersih	5,25	5,73	5,86	4,93	5,10
5	Bangunan	6,70	7,47	8,27	8,20	8,31
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	11,09	11,20	11,29	8,69	9,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,54	9,15	9,62	9,19	9,08
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	12,68	13,96	15,67	11,83	11,68
9	Jasa-jasa	8,70	9,49	9,94	9,04	9,02
	Total	4,73	4,97	5,15	4,46	4,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau
Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Dilihat dari struktur perekonomian Riau dengan memasukan unsur migas, maka sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 41,81%, dengan didominasi oleh peranan sub sektor pertambangan migas yaitu mencapai 40,93%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,83% dan sektor industri pengolahan sebesar 19,70% termasuk didalamnya sub sektor industri migas sebesar 1,78%. Dengan demikian peranan kedua sub sektor yang merupakan unsur migas yaitu sub sektor pertambangan migas dan sub sektor industri migas masih mendominasi perekonomian propinsi Riau, yaitu mencapai 42,71%. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,73%, sektor jasa-jasa sebesar 3,38%, sektor bangunan sebesar 2,51%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,00%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,85%, dan kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik & air bersih yaitu sebesar 0,19%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas sampai dengan Triwulan II – 2007 (% , y-o-y)

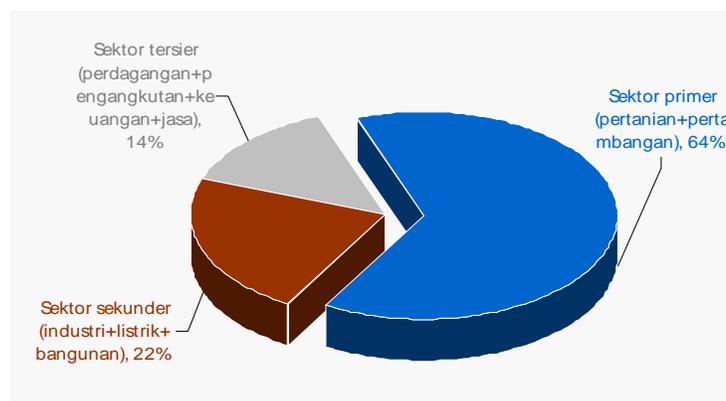
No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	21,88	21,87	21,72	22,00	21,83
2	Pertambangan dan penggalian	41,60	41,83	42,15	42,15	41,81
	- Migas	40,99	41,14	41,41	41,32	40,93
	- Pertambangan Tanpa Migas	0,36	0,44	0,48	0,56	0,61
	- Penggalian	0,25	0,26	0,27	0,26	0,26
3	Industri Pengolahan	19,92	19,67	19,34	19,14	19,70
	- Industri Migas	1,89	1,87	1,84	1,75	1,78
	- Industri Tanpa Migas	18,03	17,80	17,50	17,39	17,92
4	Listrik dan air bersih	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19
5	Bangunan	2,45	2,48	2,55	2,46	2,51
6	Perdagangan, hotel dan restoran	6,56	6,60	6,69	6,79	6,73
7	Pengangkutan dan komunikasi	1,93	1,92	1,93	1,87	1,85
8	Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	1,88	1,87	1,88	2,03	2,00
9	Jasa-jasa	3,57	3,55	3,53	3,37	3,38
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : **) angka sementara ***) angka sangat sementara

Dilihat dari aktifitas ekonomi, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi hingga 64,00%. Selanjutnya, sektor sekunder yaitu industri, listrik dan bangunan sebesar 22,00%. Sementara sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 14,00%.

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Sampai dengan Triwul II - 2007 (% , y-o-y)



3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

3.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA

Berdasarkan data dari Badan Promosi dan Investasi propinsi Riau, sampai dengan triwulan I - 2007 terdapat 1(satu) proyek Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah disetujui sebesar Rp.124,40 miliar, sedangkan realisasi tercatat sebesar Rp.1.867,80 miliar yang menyerap tenaga kerja sebanyak 11.823 Orang.

Tabel 1.8. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	5,302.00	12	5,871	387.10	3	1,713
2002	1,606.10	8	7,438	0.00	0	0
2003	1,695.10	8	2,700	160.90	2	584
2004	3,469.40	12	5,707	86.10	2	703
2005	4,579.50	11	3,221	10,230.80	15	22,795
2006	20,898.20	6	3,006	2,501.00	10	13,486
2007 :						
Tw. I *)	124.40	1	268	1,867.80	3	11,823

Sumber : BPI Propinsi Riau

*) angka koreksi

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru maupun perluasan proyek yaitu Rokan Hilir sebesar Rp.115 miliar sedangkan Kampar sebesar Rp.9,4 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau (1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI	TENAGA KERJA TKA	Jumlah
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kampar	-	-	-	-	1	9.4	61	-	-	-	-	-	9.4	61	-	-	61
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rokan Hilir	1	115	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115.0	207	-	-	207
6	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	115	207	-	1	9.4	61	-	-	-	-	1	124.4	268	-	-	268

Sumber : BPI Propinsi Riau

Selanjutnya, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Riau sampai triwulan I - 2007 terdapat 7 (tujuh) proyek yang telah disetujui dengan total nilai investasi sebesar USD2.013 juta dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.942 orang. Sedangkan realisasi investasi PMA selama triwulan laporan terdapat 1 (satu) proyek yang telah direalisasi dengan nilai investasi sebesar USD392,4 juta yang menyerap tenaga kerja sebanyak 254 orang.

Tabel 1.10. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	1,070.7	15	6,371	197.6	3	211
2002	34.2	7	1,644	1.6	2	131
2003	1,032.4	8	1,635	80.2	4	6,264
2004	214.9	10	18,232	514.3	8	4,900
2005	179.7	9	4,142	795.8	8	2,831
2006	1,788.5	30	11,935	314.6	8	12,793
2007 :						
Tw. I *)	2,013.0	7	10,942	392.4	1	254

Sumber : BPI Propinsi Riau

*) angka koreksi

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang masing-masing memperoleh persetujuan investasi baru dan perluasan. Kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pelalawan, Pekanbaru dan Dumai. Sementara kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan perluasan investasi yaitu Pelalawan, Siak dan Dumai. Sedangkan investasi PMA yang disetujui alih status terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir dan Pekanbaru (lihat tabel 1.11).

Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau (1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TNG. KERJA TKA	Jumlah
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelalawan *)	1	10.0	100	-	1	170.6	158	-	-	-	-	1	180.6	258	-	-	258
5	Siak *)	-	-	-	3	1,715.0	6,150	-	-	-	-	-	-	1,715.0	6,150	-	-	6,150
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	1	71.0	4,389	-	1	71.0	4,389	-	-	4,389
10	Pekanbaru *)	2	1.1	29	-	-	-	-	1	1.1	15	-	3	2.2	44	-	-	44
11	Dumai *)	2	15.3	81	-	1	29.0	20	-	-	-	-	2	44.3	101	-	-	101
	JUMLAH	5	26.4	210	-	5	1,914.6	6,328	-	2	72.1	4,404	-	7	2,013.1	10,942	-	10,942

Sumber : BPI Propinsi Riau

*) angka koreksi

Selanjutnya, perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor di propinsi Riau, terdapat 4 (empat) sektor ekonomi yang masing-masing memperoleh persetujuan investasi baru, perluasan dan alih status. Sektor yang memperoleh investasi baru yaitu industri makanan, industri kimia, perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memperoleh perluasan investasi yaitu industri kertas, industri kimia, industri lainnya serta listrik dan air. Sementara sektor yang mengalami alih status yaitu sektor perkebunan, industri makanan, perdagangan dan jasa lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.12.

Tabel 1.12. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Sektor di Propinsi Riau
(1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU			PERLUASAN			ALIH STATUS			TOTAL			
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan *)	-	-	-	-	-	-	1	65.3	3,960	-	1	65.3	3,960
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan *)	1	10.0	100	-	-	-	-	5.7	429	-	1	15.7	529
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Industri Kertas *)	-	-	-	1	1,174.7	1,050	-	-	-	-	-	1,174.7	1,050
11	Industri Kimia *)	1	13.0	61	2	710.7	5,158	-	-	-	1	723.7	5,219	5,219
12	Industri Lainnya *)	-	-	-	1	0.2	100	-	-	-	-	0.2	100	100
13	Perdagangan *)	2	3.1	39	-	-	-	-	0.4	7	-	2	3.5	46
14	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Listrik dan air *)	-	-	-	1	29.0	20	-	-	-	-	-	29.0	20
16	Jasa Lainnya *)	1	0.3	10	-	-	-	1	0.8	8	-	2	1.0	18
	JUMLAH	5	26.4	210	5	1,914.6	6,328	2	72.2	4,404	7	2,013.1	10,942	10,942

Sumber : BPI Propinsi Riau

*) angka koreksi

3.2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA

Dari seluruh propinsi di Indonesia realisasi investasi PMDN dan PMA, propinsi Riau sampai dengan posisi bulan Mei tahun 2007 telah menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan. Selama periode tersebut, propinsi Riau menempati urutan ke 4 dalam realisasi PMDN dengan jumlah 8 proyek senilai Rp2.213,9 miliar atau dengan kontribusi sebesar 11,90%. Sedangkan realisasi PMA menempati urutan ke 3 dengan jumlah 5 proyek senilai USD403,8 juta dengan pangsa 10,89%. (lihat tabel 1.13)

Tabel.1.13 Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Lokasi
Periode : Januari s/d. Mei 2007

PMDN					PMA				
NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (Rp.Milyar)	%	NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (USD.Juta)	%
1	JAMBI	2	4.437,3	23,86	1	JAWA TIMUR	36	1.554,1	41,91
2	SULAWESI TENGGARA	1	2.768,9	14,89	2	DKI JAKARTA	153	939,6	25,34
3	DKI JAKARTA	13	2.656,3	14,28	3	RIAU	5	403,8	10,89
4	RIAU	8	2.213,9	11,90	4	JAWA BARAT	86	290,9	7,85
5	JAWA BARAT	13	1.504,9	8,09	5	BANTEN	36	123,3	3,33
6	SUMATERA UTARA	3	1.421,3	7,64	6	JAWA TENGAH	17	65,1	1,76
7	JAWA TIMUR	5	906,9	4,88	7	SUMATERA UTARA	5	59,4	1,60
8	SULAWESI UTARA	1	624,0	3,35	8	KALIMANTAN SELATAN	3	56,2	1,52
9	SULAWESI TENGAH	2	487,6	2,62	9	SUMATERA SELATAN	2	42,5	1,15
10	KALIMANTAN TIMUR	2	431,1	2,32	10	KEPULAUAN RIAU	15	35,0	0,94
11	KALIMANTAN TENGAH	1	280,9	1,51	11	KALIMANTAN TENGAH	1	32,3	0,87
12	JAWA TENGAH	1	255,5	1,37	12	KALIMANTAN TIMUR	7	27,7	0,75
13	BANTEN	10	243,9	1,31	13	LAMPUNG	2	24,3	0,66
14	SUMATERA SELATAN	1	131,1	0,70	14	BALI	25	20,0	0,54
15	KEPULAUAN RIAU	1	80,1	0,43	15	SULAWESI SELATAN	3	18,2	0,49
16	KALIMANTAN SELATAN	-	66,7	0,36	16	SULAWESI UTARA	1	8,3	0,22
17	LAMPUNG	-	50,7	0,27	17	NUSA TENGGARA BARAT	3	4,5	0,12
18	D.I YOGYAKARTA	-	33,1	0,18	18	KALIMANTAN BARAT	1	1,2	0,03
19	BALI	1	4,1	0,02	19	SUMATERA BARAT	1	0,8	0,02
20	SULAWESI SELATAN	-	1,1	0,01	20	PAPUA	-	0,7	0,02
21	KALIMANTAN BARAT	-	0,5	0,00	21	N. ACEH DARUSSALAM	-	-	0,00
22	N. ACEH DARUSSALAM	-	-	0,00	22	JAMBI	-	-	0,00
23	SUMATERA BARAT	-	-	0,00	23	BENGKULU	-	-	0,00
24	BENGKULU	-	-	0,00	24	BANGKA BELITUNG	-	-	0,00
25	BANGKA BELITUNG	-	-	0,00	25	D.I YOGYAKARTA	-	-	0,00
26	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	0,00	26	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0,00
27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0,00	27	SULAWESI TENGAH	-	-	0,00
28	GORONTALO	-	-	0,00	28	SULAWESI TENGGARA	-	-	0,00
29	MALUKU	-	-	0,00	29	GORONTALO	-	-	0,00
30	MALUKU UTARA	-	-	0,00	30	MALUKU	-	-	0,00
31	PAPUA	-	-	0,00	31	MALUKU UTARA	-	-	0,00
JUM LA H		65	18.599,9	100,00	JUM LA H		402	3.707,9	100,00

Sumber : Website BKPM

4. Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah dipublikasikan sebelumnya kinerja keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2006. Anggaran pendapatan meningkat sebesar Rp.0.47 triliun atau sebesar 14,88% menjadi 3,65 triliun, sedangkan anggaran belanja naik sebesar 0,52 triliun atau 14,11% menjadi 4,19 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat defisit anggaran sebesar 0,54 triliun yang dibiayai dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya.

4.1 Realisasi APBD Propinsi Riau Tahun 2007

Sampai dengan triwulan II-2007, anggaran pendapatan daerah Propinsi Riau telah terealisasi sebesar Rp.1.15 triliun atau 31,41% dari total anggaran pendapatan daerah yaitu sebesar Rp.3.65 triliun. Realisasi anggaran pendapatan dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.588,61 miliar (59,44%), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) sebesar Rp.556.82 miliar (20,96%). Sementara Belanja Pemerintah Daerah telah terealisasi

sebesar Rp.0,47 triliun atau 11,22% dari total anggaran keseluruhan yaitu sebesar Rp.4,19 triliun. Secara umum ringkasan APBD Propinsi Riau sampai dengan triwulan II tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.14.

Tabel 1.14. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2007

(Rp. Juta)

Komposisi APBD Riau	Anggaran 2007	Realisasi s/d. Trw. I 2007
I. PENDAPATAN DAERAH	3,646,197.12	1,145,422.69
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	990,224.11	588,605.97
- Pajak Daerah	822,675.50	401,987.80
- Retribusi Daerah	31,571.71	19,083.84
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48,714.29	-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	87,262.61	167,534.33
2. PENDAPATAN TRANSFER	2,655,973.01	556,816.72
- Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	2,635,973.01	556,816.72
- Dana bagi hasil pajak	274,165.68	41,057.09
- Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	2,084,148.33	376,930.13
- Dana Alokasi Umum	277,659.00	138,829.50
3. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20,000.00	-
- Dana Penyesuaian	20,000.00	-
II. BELANJA DAERAH	4,187,692.06	469,910.78
1. BELANJA OPERASI	2,369,445.29	398,955.25
- Belanja Pegawai	952,615.45	236,429.39
- Belanja Barang	742,429.86	74,872.98
- Belanja Bantuan Sosial	312,270.29	86,152.89
- Belanja Bantuan Keuangan	362,129.69	1,500.00
2. BELANJA MODAL	1,808,246.77	70,777.07
- Belanja Tanah	82,361.55	-
- Belanja Peralatan dan Mesin	344,940.06	433.61
- Belanja Gedung dan Bangunan	461,123.93	26,487.42
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	795,750.96	43,279.34
- Belanja aset tetap lainnya	90,397.21	87.26
- Belanja aset lainnya	33,673.06	489.44
2. BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000.00	178.46
- Belanja Tidak Terduga	10,000.00	178.46
Surplus/Defisit	(541,494.94)	675,511.91
III. PEMBIAYAAN DAERAH	593,253.24	0.00
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	799,489.37	0.00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	799,489.37	0.00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	206,236.13	0.00
- Pembentukan Dana Cadangan	100,000.00	0.00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67,090.00	0.00
- Pembayaran Pokok Utang	39,146.13	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	593,253.24	0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SLPA)	51,758.30	675,511.92

Sumber : Biro Keuangan Propinsi Riau

Dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah, realisasi belanja terbesar terdapat pada bidang Pemerintahan Umum yaitu sebesar Rp.181.522,33 juta sedangkan realisasi anggaran belanja terendah terdapat pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan sebesar Rp.531.68 juta. (lihat tabel 1.15)

Tabel 1.15. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau
Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi s/d Triwulan II Tahun 2007

(Rp Juta)

NO.	Uraian	Anggaran Pendapatan	Realisasi	%	Anggaran Belanja	Realisasi	%
I	URUSAN WAJIB	3,645,486.81	1,145,062.73	31.41	3,752,900.82	412,801.34	11.00
1	PENDIDIKAN	0.00	0.00	0.00	543,628.41	32,044.65	5.89
	- Dinas Pendidikan	0.00	0.00	0.00	512,035.20	27,135.68	5.30
	- Badan Perpustakaan dan Arsip	0.00	0.00	0.00	31,593.21	4,908.97	15.54
2	KESEHATAN	30,733.31	18,674.70	60.76	232,851.79	33,936.64	14.57
	- Dinas Kesehatan	517.50	229.90	44.43	94,374.61	8,794.41	9.32
	- Rumah Sakit Umum Daerah	28,026.13	16,008.23	57.12	119,255.08	19,618.99	16.45
	- Rumah Sakit Jwa	2,189.68	2,436.57	111.28	19,222.10	5,523.24	28.73
3	Dns. Pemukiman & Prasarana Wil. (FU)	525.00	256.90	48.93	919,872.83	53,159.36	5.78
4	Dns. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0.00	0.00	0.00	29,822.62	0.00	0.00
5	Dns. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0.00	0.00	0.00	684.70	0.00	0.00
6	Bdn. Perencanaan Pembangunan	0.00	0.00	0.00	35,478.35	7,641.07	21.54
7	Dinas Perhubungan	1,852.10	861.79	46.53	107,525.67	34,179.45	31.79
8	Bdn. Pengen. Dampak Lingkungan	0.00	0.00	0.00	16,228.61	3,968.84	24.46
9	Dns. Transmigrasi dan Kependudukan	0.00	0.00	0.00	29,630.00	531.68	1.79
10	Bdn. Pemberdayaan dan Perlind. Masy.	0.00	0.00	0.00	7,818.08	378.02	4.84
11	Bdn. Kesejahteraan Sosial	0.00	0.00	0.00	30,874.61	6,434.04	20.84
12	Dinas Tenaga Kerja	0.00	0.00	0.00	54,599.46	7,669.13	14.05
13	Dns. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00	0.00	0.00	18,785.58	5,108.53	27.19
14	Bdn. Promosi dan Investasi	0.00	0.00	0.00	22,680.88	6,649.16	29.32
15	Dns. Kebudayaan, Kes. dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	106,822.83	12,720.00	11.91
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00	133,956.52	2,410.93	1.80
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dim. Negeri	0.00	0.00	0.00	22,960.25	5,799.77	25.26
	- Bdn. Inf. Kom. Kesatuan Bangsa	0.00	0.00	0.00	2,559.67	619.72	24.21
	- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	0.00	0.00	18,642.25	5,101.16	27.36
	- Bdn. Pember. dan Perlind. Masyarakat	0.00	0.00	0.00	1,758.33	78.89	4.49
18	Pemerintah Umum	3,612,376.40	1,125,269.34	31.15	1,357,229.40	181,522.33	13.37
	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	0.00	0.00	19,809.83	5,262.41	26.56
	- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00	1,575.34	434.59	27.59
	- Sekretariat Daerah	2,790,195.90	723,522.45	25.93	1,101,311.93	119,188.00	10.82
	- Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	75,794.27	21,514.09	28.38
	- Badan Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	0.00	27,254.95	4,474.67	16.42
	- Badan Pengawasan Daerah	0.00	0.00	0.00	12,997.14	2,987.25	22.98
	- Kantor Penghubung Pemerintah	30.00	15.99	53.30	13,791.51	3,612.98	26.20
	- Dinas Pendapatan	822,150.50	401,730.90	48.86	104,694.43	24,048.34	22.97
19	Badan Administrasi dan Diklat Pegawai	0.00	0.00	0.00	32,014.63	6,742.61	21.06
20	Bdn. Pemberd. dan Perlind. Masyarakat	0.00	0.00	0.00	21,588.22	4,335.18	20.08
21	Bd. Perpustakaan dan Arsip	0.00	0.00	0.00	1,550.72	517.73	33.39
22	Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	0.00	26,296.66	7,052.22	26.82
	- Bdn. Infor. Kom dan Kesatuan Bangsa	0.00	0.00	0.00	14,318.08	4,708.87	32.89
	- Bdn. Pengolahan Data Elektronik	0.00	0.00	0.00	11,978.58	2,343.35	19.56
II	URUSAN PILIHAN	710.30	359.97	50.68	434,791.24	57,109.44	13.13
1	Pertanian	92.00	8.80	9.57	238,081.95	21,926.81	9.21
	- Dinas Tanaman Pangan	92.00	8.80	9.57	71,488.64	9,405.29	13.16
	- Dinas Perkebunan	0.00	0.00	0.00	108,012.41	5,705.44	5.28
	- Dinas Peternakan	0.00	0.00	0.00	39,602.35	2,794.36	7.06
	- Badan Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	18,978.55	4,021.72	21.19
2	Dinas Kehutanan	0.00	0.00	0.00	45,341.11	7,104.51	15.67
3	Dns. Pertambangan dan Energi	0.00	0.00	0.00	38,468.16	5,739.21	14.92
4	Dns. Kebudayaan, Kes. Dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	10,946.68	840.99	7.68
5	Dns. Perikanan dan Kelautan	46.30	62.02	133.95	46,968.18	6,995.05	14.89
6	Dns. Perindustrian dan Perdagangan	572.00	289.15	50.55	20,299.55	6,756.30	33.28
7	Dns. Perindustrian dan Perdagangan	0.00	0.00	0.00	13,330.54	1,508.47	11.32
8	Dns. Transmigrasi dan Kependudukan	0.00	0.00	0.00	21,355.07	6,238.10	29.21
	JUMLAH	3,646,197.11	1,145,422.70	31.41	4,187,692.06	469,910.78	11.22
III.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)				51,758.30	675,511.92	

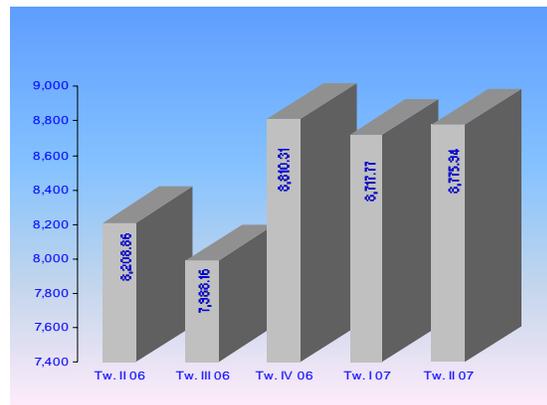
Sumber : Biro Keuangan Propinsi Riau

4.2 Posisi Gabungan Keuangan Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota) Pada Triwulan II Tahun 2007

Kuangan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Riau pada tahun 2007 semakin meningkat, terutama berkaitan dengan meningkatnya penerimaan dari bagian dana bagi

hasil sebagai dampak dari kenaikan harga migas di pasaran dunia, dan adanya sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya. Total dana pemerintah daerah yang ada di perbankan cenderung mengalami peningkatan dimana pada bulan Januari sampai dengan Juni 2007 posisinya tercatat sebesar Rp.8.775,94 miliar atau naik sebesar 7%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.8.208,86 miliar. Keterlambatan realisasi anggaran tersebut diperkirakan juga oleh adanya tahap konsolidasi penyusunan anggaran akibat terjadinya perubahan sistem yang notabene juga menyangkut pada kesiapan sumber daya manusia untuk penyesuaian sistem yang baru.

Grafik 1.4 Perkembangan Posisi Gabungan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau



5. Perkembangan Ekspor-Import Non Migas

Kinerja perdagangan luar negeri Propinsi Riau pada triwulan II 2007 masih mencatat surplus sebesar USD 1.722,59 juta. Nilai ekspor non migas pada triwulan laporan meningkat sebesar USD 656,36 juta atau 34,51% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 1.901,77 juta menjadi USD 2.558,14 juta. Disisi lain nilai impor non migas juga mengalami peningkatan sebesar USD 552,97 juta (195,69%) yaitu dari USD 282,58 juta menjadi USD 835,55 juta.

Tabel 1.16. Perkembangan Ekspor-Import Provinsi Riau Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

	Trw. II-2006	Trw. II- 2007	Δ	% Δ
Ekspor	1,901.77	2,558.14	656.36	34.51
Impor	282.58	835.55	552.97	195.69

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

5.1. Ekspor Non Migas

Nilai ekspor non migas Propinsi Riau pada triwulan Laporan tercatat sebesar USD 2.558,14 juta atau meningkat USD656,36 juta (34,51%) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas utama propinsi Riau seperti minyak dan lemak nabati (CPO), dan kertas (Kertas, kertas karton dan olahannya)

Tabel 1.17. Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

No	Kelompok	Tw II 2006	%	Tw II 2007	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	1,086.49	57.13	1,550.71	60.62	42.73
2	Pulp dan Kertas	372.54	19.59	323.31	12.64	-13.21
3	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	277.17	14.57	412.82	16.14	48.94
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	46.43	2.44	112.32	4.39	141.90
5	Buah dan Sayuran	30.03	1.58	32.16	1.26	7.08
6	Bahan makanan hewan	15.47	0.81	21.11	0.83	36.43
7	Lainnya	73.63	3.87	105.72	4.13	43.59
Total		1,901.77	100.00	2,558.14	100.00	34.51

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Ekspor kelompok minyak dan lemak nabati tercatat sebesar USD 1.550,71 juta atau 60,62% dari total ekspor non migas dan meningkat 42,73% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan dunia terhadap minyak dan lemak nabati serta didukung oleh peningkatan kinerja industri untuk memenuhi permintaan tersebut. Minyak dan lemak nabati ini terdiri dari Minyak sawit (Crude & Refined), Minyak Inti Sawit (Crude & Refined) dan Minyak Kelapa (Crude & Refined). Ekspor Minyak Sawit pada triwulan laporan tercatat USD 1.398,77 juta, Minyak Inti Sawit USD 129,88 juta dan Minyak Kelapa USD 22,07 juta.

Ekspor kelompok kertas tercatat sebesar USD 412,82 juta atau 16,14% dari total ekspor dan meningkat 48,94% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu ekspor pulp dan kertas tercatat sebesar USD 372,54 juta atau mengalami penurunan 13,21%. Mengingat kedua komoditas tersebut berada pada industri yang sama, maka kondisi di atas mencerminkan adanya pergeseran untuk menciptakan komoditi ekspor yang semula berbentuk barang setengah jadi/mentah menjadi barang jadi, sehingga proses penciptaan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditi ekspor unggulan di Riau dapat

semakin optimal, dan hal tersebut merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah di masa mendatang.

Ekspor olahan minyak dan lemak nabati pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 112,32 juta atau 4,39 % dari total ekspor, dan meningkat 141,90% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Jenis olahan minyak dan lemak nabati terbesar yaitu Minyak dan lemak nabati/hewani, Cuka Olahan dan minyak cuka hasil penyulingan. Pada triwulan laporan ekspor Minyak dan lemak nabati/hewani tercatat USD 88,51 juta, Cuka Olahan dan minyak cuka hasil penyulingan USD 25,80 juta.

Sementara itu ekspor kelompok buah dan sayuran masih tetap didominasi oleh ekspor kelapa dan nenas. Jumlah ekspor kelapa dan nenas pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 29,99 juta atau 93,24% dari jumlah ekspor kelompok ini. Ekspor Kelapa dan Nenas naik 6,81% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 28,08 juta. Adapun negara tujuan utama ekspor untuk komoditi ini adalah Singapura.

Disisi lain ekspor bahan makanan hewan pada triwulan laporan tercatat USD 21,11 juta atau meningkat 36,43% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 15,47 juta. Sedangkan komoditas ekspor lainnya yang terbesar adalah batu bara dengan nilai ekspor pada periode laporan tercatat USD 16,61 juta.

Berdasarkan negara tujuan ekspor Propinsi Riau terbesar ke Singapore dengan total nilai ekspor mencapai USD 1.304,08 juta atau 50,98 % dari jumlah nilai ekspor, Hongkong sebesar USD 406,01 juta (15,87%) dan Malaysia sebesar USD 214,39 juta (8,38%).

Tabel 1.18. Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli
Triwulan II 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

No	Negara	Trw.II-06	%	Trw.II-07	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapore	978.85	51.47	1,304.08	50.98	325.23	33.23
2	Hongkong	166.31	8.74	406.01	15.87	239.70	144.13
3	Malaysia	71.26	3.75	214.39	8.38	143.14	200.88
4	RRC	300.91	15.82	135.84	5.31	-165.07	-54.86
5	MEE	43.16	2.27	42.92	1.68	-0.24	-0.56
6	Francis	18.36	0.97	17.26	0.67	-1.09	-5.94
7	Australia	0.51	0.03	0.39	0.02	-0.12	-23.29
8	America	4.52	0.24	7.81	0.31	3.29	72.93
9	Africa	23.62	1.24	9.81	0.38	-13.81	-58.47
10	Lainnya	294.29	15.47	419.61	16.40	125.33	42.59
Total		1,901.77	100.00	2,558.14	100.00	656.36	34.51

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

5.2. Impor Non Migas

Impor non migas propinsi Riau pada triwulan laporan meningkat sangat tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 282,58 juta menjadi USD 835,55 juta atau meningkat sebesar 195,69%. Sebagian besar impor adalah dalam bentuk mesin industri, besi dan baja, mesin listrik dan peralatannya, serta bahan baku penolong seperti pupuk, pulp dan kertas bekas, (lihat 1.19). Hal ini memberikan indikasi positif karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan produktif khususnya di sektor industri, sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian secara umum.

Tabel 1.19. Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Triwulan II 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)

No	Komoditas	Tw II 2006	%	Tw II 2007	%	Kenaikan (%)
1	Mesin Industri Tertentu	82.88	29.33	343.53	41.11	314.47
2	Mesin Industri dan perlengkapannya	44.25	15.66	97.57	11.68	120.53
3	Besi dan Baja	2.41	0.85	62.25	7.45	2482.67
4	Mesin Listrik, Aparat dan alat-alatnya	5.24	1.86	42.48	5.08	710.10
5	Pulp dan Kertas Bekas	16.38	5.80	44.79	5.36	173.50
6	Pupuk Kimia buatan pabrik	36.72	12.99	42.47	5.08	15.67
7	Lainnya	94.70	33.51	202.44	24.23	113.78
Total		282.58	100.00	835.55	100.00	195.69

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Barang impor sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia, yaitu Singapura dengan nilai impor mencapai USD 368,35 juta atau 44,08% dari total impor, diikuti Australia sebesar USD 128,56 juta (15,39%), Hongkong sebesar USD 98,21 juta (11,75%). Sedangkan sisanya tersebar di negara lainnya di benua Africa, America dan Eropa.

Tabel 1.20. Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau
Triwulan II 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Tw II 2006	%	Tw II 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapura	114.70	40.59	368.35	44.08	253.65	221.14
2	Hongkong	67.96	24.05	98.21	11.75	30.26	44.52
3	Australia	12.17	4.31	128.56	15.39	116.39	956.04
4	Malaysia	26.33	9.32	61.37	7.35	35.05	133.11
5	Amerika Selatan	0.00	0.00	41.43	4.96	41.43	-
6	Negara Eropa lainnya	6.75	2.39	45.07	5.39	38.32	567.82
7	Lainnya	54.67	19.35	92.55	11.08	37.88	69.30
Total		282.58	100.00	835.55	100.00	552.97	195.69

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

5.3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran

Berdasarkan jenis valuta yang diperoleh dari kegiatan ekspor non migas, valuta USD merupakan yang terbesar. Tingginya penerimaan dalam valuta USD diperkirakan karena mata uang dimaksud bersifat *hard currencies*, atau dapat digunakan hampir diseluruh negara. Sedangkan kehadiran mata uang lainnya seperti IDR, EUR, SGD, MYR, CAD, dan GBP mengakomodir kebutuhan transaksi ekspor dari negaranya masing-masing.

Tabel.1.21. Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Triwulan II - 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No.	Valuta	Tw II 2006	Tw II 2007	No.	Cara Pembayaran	Tw II 2006	Tw II 2007
1	USD	1,878.20	2,516.52	1	Lainnya	902.85	1,197.37
2	IDR	9.17	17.27	2	Perhitungan Kemudian	460.93	558.94
3	EUR	5.76	14.93	3	Wesel Inkaso	313.95	480.90
4	SGD	2.84	2.21	4	Sight L/C	199.94	260.28
5	MYR	2.48	2.27	5	Pembayaran dimuka	24.01	36.17
6	CAD	2.45	1.59	6	Konsinyasi	0.09	0.13
7	GBP	0.84	2.62	7	Usance L/C	0.00	24.35
8	JPY	0.02	0.00				
9	AUD	0.00	0.72				
		1,901.77	2,558.14			1,901.77	2,558.14

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Untuk pembayaran ekspor non migas triwulan II Mei 2007 lebih banyak digunakan cara Perhitungan Kemudian, (unsance L/C) yaitu mencapai USD 558,94 juta. Cara pembayaran seperti ini lazimnya diterima oleh perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri. Cara pembayaran lainnya adalah Wesal Inkaso sebesar USD480,90 juta, *Sight L/C* sebesar USD 260,28 juta, pembayaran dimuka sebesar USD 36,17 juta, Konsinyasi sebesar USD 0,13 juta, *Usance L/C* sebesar USD24,35 juta dan lainnya USD 1.197,37 juta.

Tabel.1.22 Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran II 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No.	Valuta	Tw II- 2006	Tw II- 2007	No.	Cara Pembayaran	Tw I 2006	Tw I 2007
1	USD	255.82	797.06	1	Non L/C	246.53	805.00
2	EUR	12.64	19.08	2	L/C	36.05	30.55
3	MYR	6.90	11.20				
4	SGD	7.07	8.04				
5	JPY	0.12	0.07				
6	Lainnya	0.02	0.09				
		282.58	835.55			282.58	835.55

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kebutuhan valuta asing dalam rangka impor non migas propinsi Riau yang terbesar triwulan II 2007 adalah valuta USD yaitu sebesar USD 797,06 juta (95,39%). Sedangkan cara pembayaran untuk impor non migas pada periode yang sama adalah *Non L/C* yaitu sebesar USD 805 juta dan *L/C* hanya sebesar USD 30,55 juta. Banyaknya penggunaan cara pembayaran Non L/C ini diperkirakan terjadi karena mitra dagang yang relatif sama setiap tahunnya dan telah berhubungan dalam jangka waktu yang panjang, maka cara pembayaran *Non L/C* dipandang sebagai cara yang praktis dilakukan dengan dasar saling percaya.

Investasi PMDN dan PMA Masih Banyak Menghadapi Kendala

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai triwulan I - 2007, berdasarkan laporan persetujuan dan realisasi investasi PMDN terdapat 1 (satu) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar Rp.124,40 miliar. Sementara realisasi tercatat sebesar Rp.1.867,80 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 3 (tiga) proyek. Realisasi tersebut diperkirakan berasal dari persetujuan proyek tahun-tahun sebelumnya. Total daya serap tenaga kerja dari persetujuan dan realisasi tersebut diperkirakan mencapai 12.091 orang. Rata-rata realisasi PMDN dibandingkan dengan rencana yang telah disetujui dalam 5 (lima) tahun terakhir (2002-2006), mencapai 40,25%

Tabel Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN
di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2002	1.606,10	8	7.438	0,00	0	0
2003	1.695,10	8	2.700	160,90	2	584
2004	3.469,40	12	5.707	86,10	2	703
2005	4.579,50	11	3.221	10.230,80	15	22.795
2006	20.898,20	6	3.006	2.501,00	10	13.486
2007 :						
Tw. I	124,40	1	268	1.867,80	3	11.823

Sumber :BPI Propinsi Riau

Secara umum, minat investor asing untuk berinvestasi di Riau pada 2 (dua) tahun terakhir juga cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya nilai persetujuan PMA yaitu mencapai USD1.788,5 juta pada tahun 2006 dan sampai dengan bulan Maret 2007 tercatat sebesar USD 2.013 juta. Berdasarkan sektoral, terdapat tiga sektor unggulan yang sangat diminati oleh asing yaitu industri kertas, industri kimia dan perkebunan. Rata-rata realisasi PMA dibandingkan dengan rencana yang telah disetujui dalam 5 (lima) tahun terakhir (2002-2006), mencapai 52,51% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi PMDN. Sementara itu, realisasi PMA dalam 5 (lima) tahun terakhir memberikan dampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja karena mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 26.919 orang.

Tabel Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA
di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (USD Juta)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (USD Juta)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2002	34,2	7	1.644	1,6	2	131
2003	1.032,4	8	1.635	80,2	4	6.264
2004	214,9	10	18.232	514,3	8	4.900
2005	179,7	9	4.142	795,8	8	2.831
2006	1.788,5	30	11.935	314,6	8	12.793
2007 :						
Tw. I	2.013,0	7	10.942	392,4	1	254

Sumber :BPI Propinsi Riau

Melihat besarnya peranan PMDN dan PMA dalam perekonomian khususnya penciptaan lapangan kerja, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan minat dan realisasi PMDN/PMA, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki regulasi terkait dengan ketenagakerjaan, kebijakan upah minimum, pengaturan hak tenaga kerja asing dan lokal, serta pembebasan/kepemilikan lahan
- 2) Menyiapkan infrastruktur yang memadai seperti listrik, air, jalan, dan menjamin kelancaran transportasi
- 3) Mempercepat proses perizinan dan menertibkan standarisasi biaya yang diperlukan
- 4) Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai

Bab 2

PERKEMBANGAN

INFLASI REGIONAL

1. Kondisi Umum

Pada triwulan II – 2007, perkembangan harga yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru mengalami deflasi sebesar 1,50% (q-t-q), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,67% dan 0,89% (q-t-q), serta lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang mencapai 0,17% (q-t-q). Faktor pendukung terjadinya deflasi antara lain melimpahnya pasokan beras, dan rendahnya tekanan inflasi pada kelompok harga yang dikendalikan oleh pemerintah (*administered prices*)¹. Melimpahnya pasokan beras membuat harga beras mengalami deflasi dan menjadi penyumbang deflasi yang cukup besar untuk kota Pekanbaru.

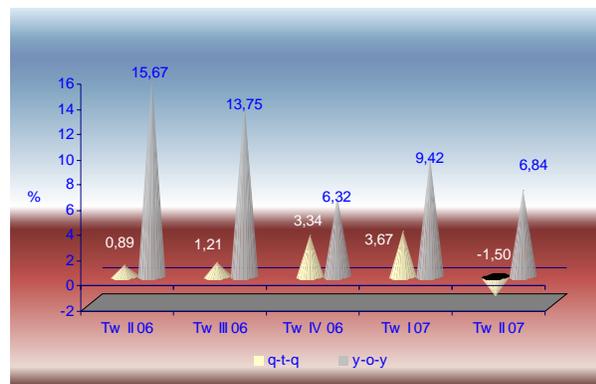
¹ Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga pemerintah, seperti BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Laju inflasi inti² dalam triwulan II – 2007 tercatat sebesar 0,01%, sedangkan inflasi non inti yang terdiri dari *administered price* dan *volatile food*³ masing-masing sebesar -0,86% dan -5,14%. Laju inflasi inti tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya stabilitas moneter dalam triwulan laporan memberikan pengaruh terhadap rendahnya laju inflasi..

2. Perkembangan dan Faktor Penyebab Inflasi di Kota Pekanbaru

Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar -1,50% (deflasi), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,67% dan inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,89%. Laju inflasi tahunan (y-o-y) sebesar 6,84%, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,67%.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Dalam triwulanan laporan, inflasi secara bulanan menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada bulan April, Mei dan Juni terjadi deflasi secara berturut-turut yaitu 0,91%, 0,58%, dan 0,01%. Deflasi pada bulan April dan Mei didominasi oleh penurunan pada kelompok bahan makanan yaitu beras dan cabe merah, sementara itu deflasi pada bulan Juni didominasi oleh penurunan pada kelompok perumahan (perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar) yaitu komoditas minyak tanah.

² Inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu interaksi permintaan-penawaran dan lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, dll)

³ Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.

Tabel 2.1. Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa
Triwulan II Tahun 2007

NO	KELOMPOK	April		Mei		Juni		Tw II 07	
		Inflasi (%)	Andil (%)						
1.	Bahan Makanan	-3,33	-0,98	-2,07	-0,59	0,79	0,24	-4,58	-1,34
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,06	0,01	-0,02	0,00	0,18	0,03	0,21	0,04
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,08	0,02	0,11	0,03	-0,90	-0,21	-0,71	-0,16
4.	Sandang	-0,02	0,00	-0,21	-0,02	-0,70	-0,06	-0,93	-0,09
5.	Kesehatan	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,15	0,01
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,40	0,04	0,07	0,01	0,02	0,00	0,49	0,05
	UMUM	-0,91	-0,91	-0,58	-0,58	-0,01	-0,01	-1,50	-1,50

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka selama triwulan II – 2007 terjadi deflasi pada kelompok bahan makanan, perumahan, dan kelompok sandang yang masing-masing tercatat sebesar 4,58%, 0,71% dan 0,93%. Dilihat dari kontribusi terhadap deflasi kota Pekanbaru, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar yang tercatat sebesar 1,34% lalu diikuti oleh kelompok perumahan dan kelompok sandang yang masing-masing tercatat sebesar 0,16% dan 0,09%. Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi terbesar antara lain cabe merah (-0,70%), beras (-0,66%), minyak tanah (-0,23%), tomat sayur (-0,23%) dan emas perhiasan (-0,10%). Kondisi ini disebabkan oleh tersedianya pasokan yang mencukupi bagi komoditas tersebut baik yang berasal dari propinsi lain maupun impor dari negara lain⁴ sehingga terjadi koreksi terhadap kenaikan harga yang cukup tinggi pada periode sebelumnya.

Melihat besarnya pengaruh kelompok bahan makanan terhadap laju inflasi di propinsi Riau, maka program mandiri pangan pada tahun 2013 yang dicanangkan oleh Pemda Riau perlu segera direalisasikan dan mendapat dukungan semua pihak. Sebagai titik awal untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah Propinsi Riau akan melakukan pengembangan tanaman padi melalui kegiatan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), yang dananya merupakan *sharing budget* melalui APBN, APBD propinsi dan APBD kabupaten dan kota.

⁴ Pada akhir triwulan I – 2007 terdapat impor beras sebanyak 55 ribu ton dari negara Vietnam

Menurut komoditinya, sepuluh komoditi yang mengalami laju deflasi tertinggi adalah tomat sayur, terong panjang, daun bawang, cabe hijau, sawi hijau, cabe merah, gurame, cabe rawit, kerang dan nanas. Namun, komoditas yang memberikan kontribusi tertinggi pada deflasi adalah cabe merah, beras, minyak tanah, tomat sayur, emas perhiasan, patin, serai, bawang putih, gula pasir, dan terong panjang. Jadi meskipun tomat sayur dan terong panjang mengalami deflasi tertinggi, namun cabe merah dan beras memberikan peran yang lebih besar dalam pembentukan deflasi di kota Pekanbaru. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Deflasi dan Kontribusi Tertinggi selama Triwulan II Tahun 2007. Hampir semua komoditas tersebut mengalami deflasi sejak bulan April 2007, terutama cabe merah dan beras yang mempunyai kontribusi terbesar.

Tabel 2.2. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Deflasi dan Kontribusi Tertinggi selama Triwulan II Tahun 2007

Triwulan II 2007					
No.	Komoditas	Deflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Tomat Sayur	46,40	1	Cabe Merah	0,70
2	Terong Panjang	29,99	2	Beras	0,66
3	Daun Bawang	28,57	3	Minyak Tanah	0,23
4	Cabe Hijau	24,02	4	Tomat Sayur	0,23
5	Sawi Hijau	23,79	5	Emas Perhiasan	0,10
6	Cabe Merah	19,31	6	Patin	0,05
7	Gurame	17,28	7	Serai	0,05
8	Cabe Rawit	17,22	8	Bawang Putih	0,05
9	Kerang	15,62	9	Gula Pasir	0,04
10	Nanas	15,38	10	Terong Panjang	0,02

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Sementara itu, kelompok makanan jadi (makanan jadi, minuman, rokok & tembakau), kelompok kesehatan, kelompok pendidikan (pendidikan, rekreasi & olah raga) dan kelompok transpor (transpor, komunikasi & jasa keuangan) mengalami inflasi yang masing-masing tercatat sebesar 0,21%, 0,17%, 0,15%, dan 0,49%.

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi adalah daging ayam ras dan minyak goreng yang masing-masing tercatat sebesar 0,19% dan 0,17%. Tingginya permintaan akan daging ayam membuat pemasok kesulitan untuk memenuhinya, hal ini terkait dengan merebaknya isu flu burung sehingga pemasokannya harus melalui pengawasan yang cukup ketat. Melambungnya harga minyak goreng disebabkan karena implikasi kenaikan harga CPO di pasar dunia yang mencapai USD700 per ton, sehingga para pengusaha CPO lebih memilih ekspor yang lebih menghasilkan keuntungan. Kenaikan

harga CPO di pasar dunia disebabkan meningkatnya permintaan energi dari tanaman atau biofuel yang semakin marak di Eropa dan Amerika Serikat, karena buah sawit ini tidak hanya digunakan untuk minyak goreng, tapi juga untuk menghasilkan biofuel.

Sementara itu, sepuluh komoditi yang mengalami laju inflasi tertinggi adalah besi beton, sawi hijau, petai, batu bata/tela, jengkol, gurame, dencis, selais asap, bawang merah, ban luar mobil. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan inflasi, maka komoditas daging ayam ras, minyak goreng, petai, bawang merah, jeruk, telur ayam ras, kentang, ikan asin belah, besi beton dan rokok kretek memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di kota Pekanbaru.

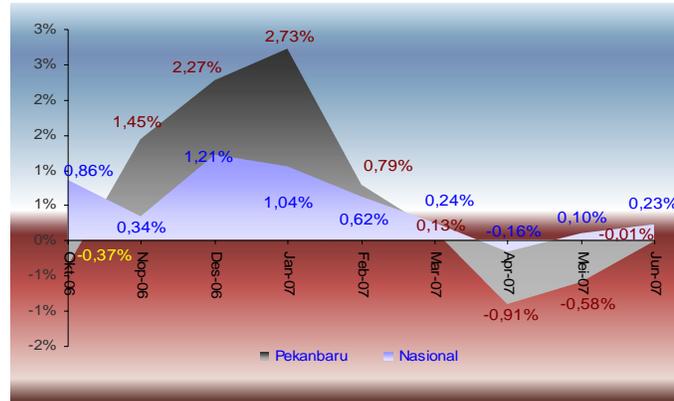
Tabel 2.3. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan II Tahun 2007

Triwulan II 2007					
No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Besi Beton	56,79	1	Daging Ayam Ras	0,19
2	Sawi Hijau	45,83	2	Minyak Goreng	0,17
3	Petai	36,99	3	Petai	0,08
4	Batu Bata/Tela	25,13	4	Bawang Merah	0,06
5	Jengkol	24,15	5	Jeruk	0,05
6	Gurame	15,85	6	Telur Ayam Ras	0,05
7	Dencis	13,33	7	Kentang	0,04
8	Selais Asap	12,30	8	Ikan Asin Belah	0,04
9	Bawang Merah	11,34	9	Besi Beton	0,04
10	Ban Luar Mobil	10,91	10	Rokok Kretek	0,03

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Dari grafik 2.2. terlihat bahwa sejak Maret 2007 inflasi di kota Pekanbaru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, hal ini berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dimana inflasi Pekanbaru cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Namun inflasi tahunan (y-o-y) kota Pekanbaru masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,84% sementara inflasi nasional sebesar 5,77%.

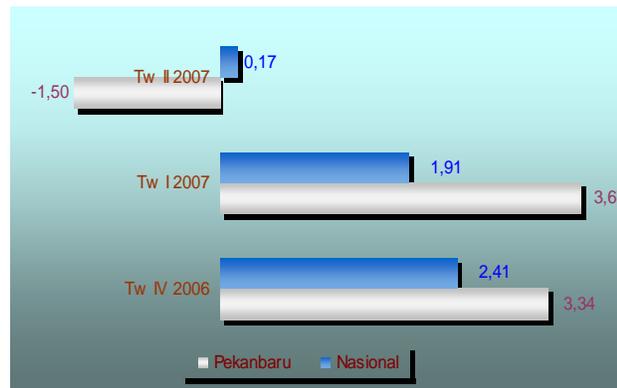
Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Penyumbang utama deflasi nasional pada bulan April adalah beras dan cabe merah yang masing-masing sebesar 0,37% dan 0,17%. Sementara pada bulan Mei dan Juni secara nasional mengalami inflasi, dengan penyumbang utama adalah minyak goreng sebesar 0,08%. Hal ini mencerminkan bahwa melimpahnya beras dan langkanya minyak goreng tidak hanya terjadi di kota Pekanbaru, namun hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional



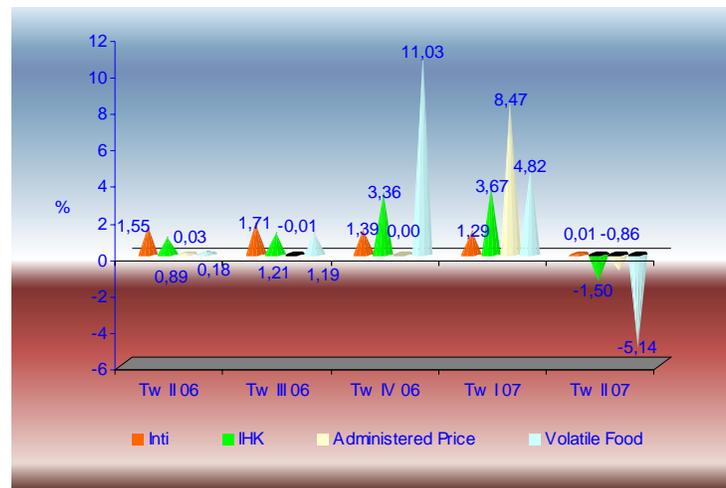
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Laju inflasi nasional pada triwulan laporan mencapai 0,17% (q-t-q) atau lebih tinggi dari inflasi Pekanbaru. Sementara pada triwulan-triwulan sebelumnya laju inflasi kota Pekanbaru lebih tinggi dari inflasi nasional. Laju inflasi nasional dan kota Pekanbaru secara triwulanan ditunjukkan oleh grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.

3. PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN INFLASI DI KOTA PEKANBARU

Pada triwulan laporan, perkembangan inflasi inti menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penguatan nilai tukar rupiah menjadi penyebab utama penurunan inflasi inti pada triwulan II – 2007 dan memberikan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,37%.

Grafik 2.4. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi

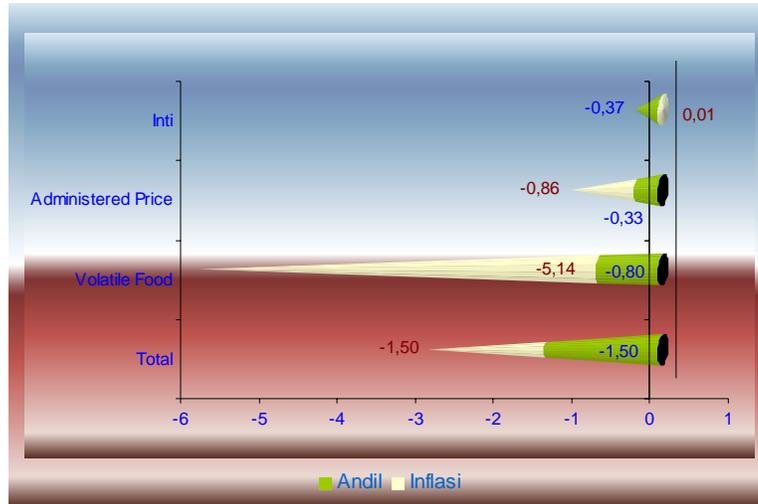


Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Sementara itu, berkurangnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, memperlambat laju inflasi yang terjadi pada komponen *volatile food* dari 4,82% menjadi deflasi 5,14% dan memberikan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,80%. Inflasi pada beberapa komponen *volatile food* mengalami perlambatan yang signifikan, dan sebagian besar mengalami deflasi. Barang dan jasa komponen *volatile food* yang mengalami deflasi antara lain tomat sayur, terong panjang, beras, dan lain-lain. Sementara barang dan jasa komponen *volatile food* yang mengalami inflasi antara lain petai, tenggiri, kol putih, minyak goreng, dan lain-lain.

Inflasi pada kelompok *administered price* juga mengalami penurunan, setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan sebelumnya, dari 8,47% menjadi deflasi 0,86% dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,86%. Barang dan komponen *administired price* yang mengalami penurunan harga deflasi adalah minyak tanah sementara yang mengalami inflasi adalah gas elpiji.

Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan II 2007



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Di Riau; Langkah Proaktif Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat tujuh skala prioritas pembangunan nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat yaitu pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, pembangunan infrastruktur, mewujudkan pemerintah yang baik dan bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka merespon kebijakan pemerintah pusat tersebut, pemerintah provinsi Riau telah menetapkan visi provinsi Riau 2020 yaitu terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020. Dalam kerangka jangka pendek dan menengah visi tersebut, provinsi Riau telah mencanangkan Program K2I yaitu: pengentasan kemiskinan, penanggulangan kebodohan dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai salah satu upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, Pemda Riau menggagas percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang antara lain meliputi pembangunan jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, pembangunan Terminal Agribisnis Kota Dumai, Pembangunan sekolah menengah kejuruan di 11 kabupaten/kota, pembangunan rumah layak huni, pembangunan kebun kelapa sawit untuk rakyat miskin seluas 60.000 ha, pemberian bantuan dana usaha desa. Pembangunan berbagai proyek-proyek strategis tersebut diharapkan dapat memberikan akselerasi yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Riau.

Untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan dananya di Riau, maka pemerintah Riau juga menawarkan lima pembangunan mega proyek strategis antara lain Development of New Highway (\$506,850,722), Pekanbaru Industrial Park (\$58,556,625), Dumai International Seaport (\$1,141,912,244), Rokan Hulu Regency Powerplant (\$222,885,459) dan Pasir Pangarayan-Dumai Feeder Track (\$555,960,055)

Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah

Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah memiliki panjang 1.196 meter yang terletak di atas sungai Siak. Jembatan yang dirancang bisa berumur sampai lebih dari 100 tahun tersebut, terbentang di atas sungai sepanjang 300 M, dan mampu menanggung beban sebanyak 28 ton.

Jembatan ini memiliki dua menara dengan ketinggian kurang lebih 80 M dengan ukuran 10x5 M, yang digunakan untuk diorama teater dan rumah makan. Jembatan ini dirancang dengan sistem *cabre stayed* dan menghabiskan dana sebesar Rp. 277, 65 milyar dari APBD murni Kabupaten Siak

Secara ekonomi, jembatan ini merupakan aset potensial provinsi Riau untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri, karena jembatan tersebut dapat menjadi penghubung beberapa kawasan industri yang akan dibangun oleh pemda seperti kawasan industri Buton dan Dumai. Selain itu, keberadaan jembatan juga dapat menambah objek wisata yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional, dan mengintegrasikan objek wisata yang sudah ada yaitu Istana Kerajaan Siak.

Pembangunan Terminal Agribisnis Kota Dumai

Terminal Agribisnis kota Dumai ini menghabiskan dana sebesar Rp.27.694.603.819,- untuk pembangunan fisik dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Riau, dan Rp.10 milyar untuk penyediaan lahan seluas 4 ha yang bersumber dari APBD Kota Dumai. Terminal ini terdiri dari bangunan induk sebanyak 2 lantai seluar 3.350 m2 dan bangunan penunjang lainnya seperti bangunan grosir besar, bangunan grosir kecil, processing, dengan areal parker seluas 4.000 m2 dan ruang terbuka seluas 8.000 m2 lengkap dengan jaringan listrik, air dan telepon. Terminal ini dipersiapkan untuk menampung hasil-hasil produksi pertanian baik dari provinsi Riau maupun provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Letak terminal yang sangat strategis karena berdekatan dengan pelabuhan Dumai, akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekspor pertanian dan perekonomian propinsi Riau

Pembangunan Rumah Layak Huni, Program Bantuan Dana Usaha Desa (DUD), dan Lahan Kelapa Sawit.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah provinsi Riau melakukan beberapa langkah strategis antara lain melakukan pembangunan rumah layak huni, pembangunan lahan kelapa sawit, dan pemberian program Bantuan Dana Usaha Desa (DUD). Pembangunan rumah layak huni diperuntukkan bagi 40.000 kepala keluarga. Disamping itu juga digagas pembangunan lahan kelapa sawit seluas 60.000 ha. Pembangunan kelapa sawit tersebut difokuskan pada 7 kabupaten dan masing-masing kepala keluarga mendapatkan kebun sawit seluas 3 ha. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan, maka pemerintah daerah juga memberikan program bantuan dana usaha desa yang meliputi 54 desa/kelurahan di tingkat provinsi dengan total biaya Rp 27 milyar dan 63 desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota dengan biaya sebesar Rp 26,30 milyar.

Dari ketiga program di atas, khusus untuk program DUD dan pembangunan lahan kelapa sawit akan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan UMKM. Keberhasilan program ini juga memberikan dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Saat ini jumlah penduduk miskin di provinsi Riau masih cukup tinggi yaitu sekitar 11,12%.

Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pembangunan SMK di 11 kabupaten/kota se-provinsi Riau bertujuan untuk menampung 2.200 siswa-siswi dengan total biaya sebesar Rp 42.199.039.130 yang berasal dari APBD tingkat I. Pembangunan SMK ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, yaitu ;

- 1) Kelompok pertanian; meliputi kota Dumai, kabupaten Kuntan Singingi, kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.
- 2) Kelompok teknologi; meliputi kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir.
- 3) Kelompok pariwisata di kabupaten Rokan Hilir.

Program pembangunan SMK merupakan suatu jawaban terhadap permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai yang saat ini menjadi salah satu masalah di provinsi Riau. Dengan program ini maka angkatan kerja yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan user, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan mengurangi tingkat pengangguran.

Bab 3

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN

DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kondisi moneter dan Perbankan di propinsi Riau menunjukkan peningkatan

KONDISI moneter dan perbankan di propinsi Riau selama triwulan laporan secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan indikator-indikator ekonomi makro yang terus berlanjut mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di propinsi Riau. Selama triwulan laporan Bank Indonesia masih terus melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan BI – Rate sebesar 50 basis point (bps). Penurunan tersebut sudah direspon oleh perbankan dengan penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Likuiditas perbankan yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit pada akhirnya ditanamkan dalam bentuk SBI sebagai alternatif penanaman dana yang aman bagi perbankan dan sesuai dengan *maturity* dari dana yang diterima.

Kualitas kredit perbankan menunjukkan perbaikan

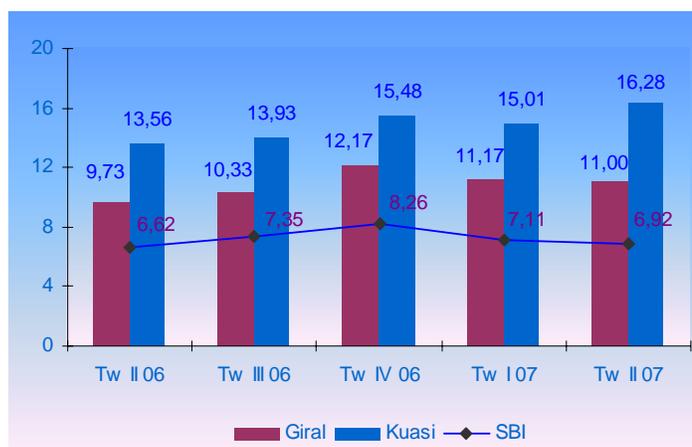
Pengelolaan risiko kredit perbankan menunjukkan perbaikan dengan turunnya jumlah kredit bermasalah dan rasio *Non Performing Loans* (NPLs) meskipun jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Penurunan beban operasional perbankan yang diiringi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan meningkatnya profitabilitas perbankan pada triwulan laporan. Likuiditas perbankan dalam triwulan laporan masih tetap terjaga namun lebih besarnya pertumbuhan dana dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami penurunan. Pangsa Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit masih terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini merupakan indikasi adanya potensi dan kepedulian perbankan dalam pengembangan UMKM.

1. Perkembangan Moneter

Kondisi ekonomi pada triwulan laporan menunjukkan perbaikan yang antara lain tercermin dari meningkatnya beberapa indikator-indikator moneter (peredaran uang) seperti uang kuasi (tabungan dan deposito), meskipun uang giral mengalami sedikit penurunan. Penurunan jumlah uang giral disebabkan adanya penarikan dana APBD yang disimpan dalam bentuk giro oleh Pemda dalam rangka merealisasikan proyek-proyek yang telah direncanakan. Sementara itu, jumlah SBI yang dimiliki perbankan di propinsi Riau mengalami penurunan, sebagai dampak dari menurunnya dana pemda dan suku bunga SBI.

Pada triwulan laporan, jumlah uang kuasi mengalami peningkatan dari Rp.15.013.947 juta menjadi Rp. 16.276.652 juta atau tumbuh sebesar 8,41%, sementara uang giral menurun dari Rp.11.165.540 juta menjadi Rp. 11.001.581 juta atau turun sebesar 1,47% dibandingkan dengan triwulan I - 2007. Namun demikian, secara total dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) yang merupakan bagian dari komponen uang beredar mengalami peningkatan sebesar Rp.1.098.746 juta (4,20%) menjadi sebesar Rp.27.278.233 juta. Penempatan dana dalam bentuk SBI menunjukkan penurunan dari Rp. 7.108.831 juta menjadi Rp. 6.918.178 juta, atau turun 2,68%.

Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Propinsi Riau



2. Perkembangan Perbankan

Kondisi perbankan di propinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik jaringan kantor, total aset, dana pihak ketiga maupun kredit yang disalurkan. Selain itu juga terjadi perbaikan kualitas kredit serta meningkatnya perolehan laba dan penyaluran kredit kepada UMKM.

2.1. Bank Umum

2.1.1. Jaringan Kantor

Tabel 3.1. Perkembangan Bank di Propinsi Riau

Keterangan	Periode	
	Tw I 07	Tw II 07
1. Jumlah Bank	32	33
- Pemerintah	6	6
- Swasta	20	21
- Asing	1	1
- Syariah	2	2
- Unit Usaha Syariah	3	3
2. Kantor Pusat	1	1
3. Kantor Cabang	64	65
- Pemerintah	41	41
- Swasta	22	23
- Asing	1	1
4. Kantor Cab. Pembantu	83	85
- Pemerintah	46	48
- Swasta	37	37
- Asing	0	0
5. Kantor Kas	34	34
- Pemerintah	22	22
- Swasta	12	12
6. BRI Unit	71	71
7. DSP	12	12
8. Lainnya *)	36	38
	301	306

*) Payment point, VOA, RCR, Kantor Layanan Syariah dan Gerai

Jumlah bank umum yang beroperasi di propinsi Riau hingga akhir triwulan laporan tercatat 33 bank, bertambah 1 bank yaitu bank Century. Selama triwulan laporan terdapat pembukaan 1 Kantor Cabang di Pekanbaru, 2 KCP masing-masing di Pekanbaru dan Pelalawan, dan 2 kantor layanan setingkat payment point di Pekanbaru dan Kampar. Dengan demikian sampai dengan triwulan II – 2007 jumlah jaringan kantor sebanyak 306 kantor atau bertambah 5 kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Diperkirakan perluasan jaringan kantor bank umum di propinsi Riau masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan masuknya bank-bank asing atau

campuran. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin matang, dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat merupakan insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya. Penyebaran kantor di propinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.2. Data tersebut menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten jumlah bank yang beroperasi masih relatif terbatas, terutama bank-bank swasta.

Tabel 3.2. Jaringan Kantor Bank Umum di Propinsi Riau (Juni 2007)

No	Kab./Kota	Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota						
		KP	KC	KCP	KK	BRI Unit	DSP	Lainnya
1	Pekanbaru	1	37	44	17	14	4	19
2	Bengkalis	0	7	10	2	11	1	6
3	Dumai	0	6	2	2	5	1	4
4	Indragiri Hulu	0	4	3	5	4	1	0
5	Indragiri Hilir	0	3	2	0	8	0	1
6	Kampar	0	2	3	1	9	1	3
7	Kuantan Singingi	0	1	2	2	6	1	2
8	Pelalawan	0	1	7	0	4	1	1
9	Rokan Hulu	0	1	3	1	2	1	0
10	Rokan Hilir	0	2	4	2	4	1	0
11	Sak	0	1	5	2	4	0	2
Total		1	65	85	34	71	12	38

Tabel 3.3. Data ATM Bank Per Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau

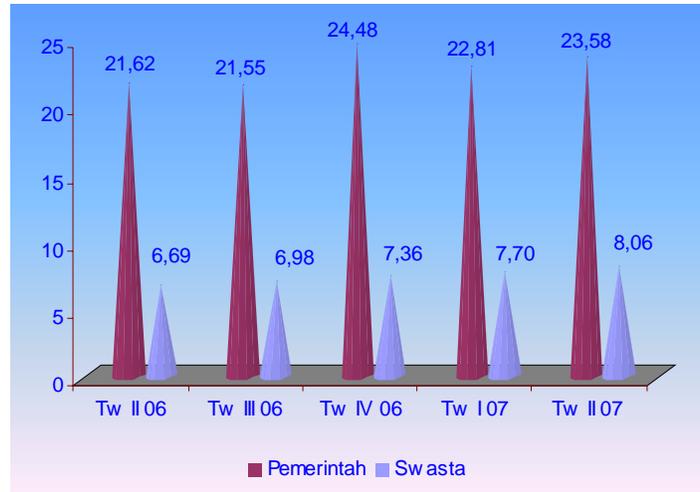
No.	Keterangan	Tw I 2007	Tw II 2007
I. Kabupaten/Kota			
1	Pekanbaru	207	209
2	Dumai	14	14
3	Bengkalis	29	29
4	Inhil	6	6
5	Inhu	4	4
6	Rohil	7	7
7	Rohul	3	3
8	Kampar	3	3
9	Sak	16	16
10	Palalawan	12	12
11	Kuantan Singingi	3	3
Jumlah		304	306
II. Kelompok Bank			
1	Pemerintah	167	169
2	Swasta	137	137
Jumlah		304	306

Seiring dengan penambahan jumlah kantor bank, jumlah ATM yang beroperasi di propinsi Riau juga mengalami peningkatan. Selama triwulan laporan jumlah ATM bertambah sebanyak 2 unit ATM sehingga jumlah jaringan ATM menjadi 306 unit.

2.1.2. Perkembangan Aset

Total aset bank umum di propinsi Riau pada triwulan laporan sebesar Rp.31.641.238 juta meningkat Rp.1.133.574 juta atau 3,72% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada kelompok bank pemerintah maupun kelompok bank swasta, sebagai dampak dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga. Peningkatan aset kelompok bank swasta mencapai yaitu 4,69% sedangkan kelompok bank pemerintah sebesar 3,39%. Sementara itu, pangsa aset bank pemerintah mencapai 74,53% dan bank swasta sebesar 25,47%

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Propinsi Riau



2.1.3. Kredit

Penyaluran kredit masih terus menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya persetujuan kredit baru. *Undisbursed Loan* perbankan kembali mengalami peningkatan setelah triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Penyaluran kredit kepada sektor UMKM jumlahnya terus menunjukkan peningkatan dan semakin mendominasi dari total kredit perbankan.

2.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Posisi kredit yang disalurkan oleh bank umum di propinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp.14.568.211 juta meningkat 4,04% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Rp.14.002.435 juta. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,07%. Kondisi ini memberikan indikasi positif terhadap kegiatan perekonomian dan diharapkan akan terus berlanjut pada triwulan yang akan datang. Keyakinan ini didasarkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain melalui penurunan suku bunga SBI dan dikeluarkannya PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa bank dapat menetapkan kualitas yang berbeda untuk Aktiva Produktif yang diberikan kepada debitur yang sama dan

memiliki beberapa proyek yang berbeda serta terdapat pemisahan *cash flow* yang tegas dari masing-masing proyek.

Tabel 3.4. Posisi Kredit Di Propinsi Riau
(Dalam Jutaan Rupiah)

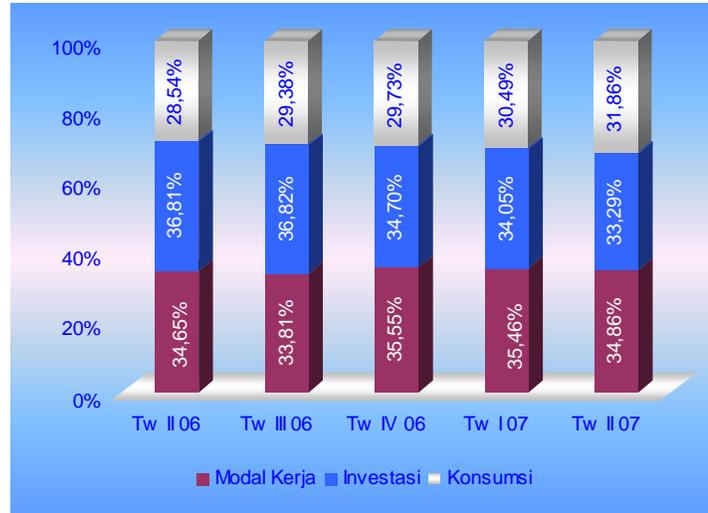
Keterangan	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Δ
A. Kelompok Bank						
1. Bank Pemerintah	8.992.459	9.089.684	9.625.537	9.628.109	9.935.275	3,19%
2. Bank Swasta	4.113.082	4.213.354	4.229.304	4.374.326	4.632.936	5,91%
B. Jenis Penggunaan						
1. Modal Kerja	4.541.109	4.497.601	4.921.399	4.965.493	5.078.287	2,27%
2. Investasi	4.824.022	4.897.612	4.807.768	4.768.110	4.849.186	1,70%
3. Konsumsi	3.740.410	3.907.825	4.125.674	4.268.832	4.640.738	8,71%
C. Valuta						
1. Rupiah	11.561.924	11.870.866	12.327.023	12.477.855	13.074.858	4,78%
2. Valas	1.543.617	1.432.172	1.527.818	1.524.580	1.493.353	-2,05%
D. Total	13.105.541	13.303.038	13.854.841	14.002.435	14.568.211	4,04%

Dilihat dari jenis valutanya, kredit dalam mata uang rupiah tumbuh sebesar 4,78% menjadi sebesar Rp.13.074.858 juta, sementara kredit dalam valuta asing turun sebesar 2,05% menjadi Rp.1.493.235 juta. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memberikan pengaruh terhadap kondisi tersebut. Pangsa kredit rupiah terhadap total kredit sebesar 89,35% atau meningkat dibanding dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 88,97%.

2.1.3.2. Konsentrasi Kredit

Berdasarkan jenis penggunaan, jumlah kredit modal kerja mencapai Rp.5.078.287 juta atau tumbuh 2,27% dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan kredit investasi sebesar Rp. 4.848.186 juta atau tumbuh sebesar 1,70%. Pangsa kredit modal kerja dan kredit investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha masing-masing sebesar 34,86% dan 33,29% menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 35,46% dan 34,05%. Pangsa terbesar kredit modal kerja disalurkan kepada sektor perdagangan eceran yaitu 29,82%, diikuti sektor perkebunan sebesar 12,94%. Untuk kredit investasi, pangsa terbesar disalurkan kepada sektor perkebunan yaitu sebesar 45,80%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 14,15%.

Grafik 3.3. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan Di Propinsi Riau



Sementara itu, kredit konsumsi masih terus menunjukkan peningkatan, dan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.4.640.738 juta atau mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 8,71% dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pangsa kredit konsumsi mencapai 31,86% dari total kredit dan sekitar 40,59% dari kredit konsumsi tersebut adalah kredit untuk perumahan, terutama perumahan type 70 ke bawah. Tingginya pertumbuhan kredit konsumsi untuk perumahan tersebut mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih cukup tinggi.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor pertanian yang mencapai 22,33% dari total kredit atau mencapai Rp.3.253.308 juta. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.878.485 juta (88,16%) merupakan kredit kepada sub sektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada sektor pertanian terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau 27% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 5,54 juta hektar.

Sektor usaha yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yaitu sebesar Rp.3.042.450 juta atau 20,88% dari total kredit. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh peningkatan aktivitas ekonomi di Riau. Dengan melihat perkembangan yang mengembirakan untuk kredit pada sektor perdagangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi

penyaluran kredit oleh perbankan sudah sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah yang terlihat dari besarnya peranan sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan.

Sementara itu kredit kepada sektor industri tercatat sebesar Rp.1.727.481 juta atau 11,86%, dan kredit kepada sektor lain-lain tercatat sebesar Rp.4.652.509 juta atau 31,94% dari total kredit. Pada kredit sektor lain-lain tersebut termasuk kredit perumahan yang tercatat Rp.1.883.854 juta. Kredit kepada sektor jasa mencapai Rp.1.080.211 juta atau 7,41% dari total kredit dan kredit sektor konstruksi tercatat sebesar Rp.563.100 juta atau 3,87% dari total kredit. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan perkembangan sektor properti di propinsi Riau, sehingga ditengarai banyak developer yang menggunakan *self financing* untuk membiayai proyeknya.

Dilihat dari penyebaran kredit di kota/kabupaten, kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Propinsi Riau masih terkonsentrasi di kota Pekanbaru. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di kota ini sampai akhir periode laporan tercatat sebesar Rp.10.737.120 juta (73,70%). Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat kota Pekanbaru adalah ibukota Propinsi Riau, sehingga disamping berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat bisnis utama baik perbankan maupun non perbankan di Propinsi Riau yang tumbuh cukup pesat di era otonomi daerah.

Besarnya potensi ekonomi di kabupaten dan kota di propinsi Riau juga terlihat dari lebih besarnya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek. Jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar Rp.22.034.492 juta. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank pada semua kota/kabupaten. Kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mengalami peningkatan hampir pada semua kota kecuali kota Dumai, yang terus menunjukkan kecenderungan menurun. Peningkatan tertinggi terdapat di kabupaten Bengkalis yang mencapai 28,04%, sementara kota Dumai mengalami penurunan tertinggi yaitu 8,30%.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II Di Propinsi Riau (Jutaan Rupiah)

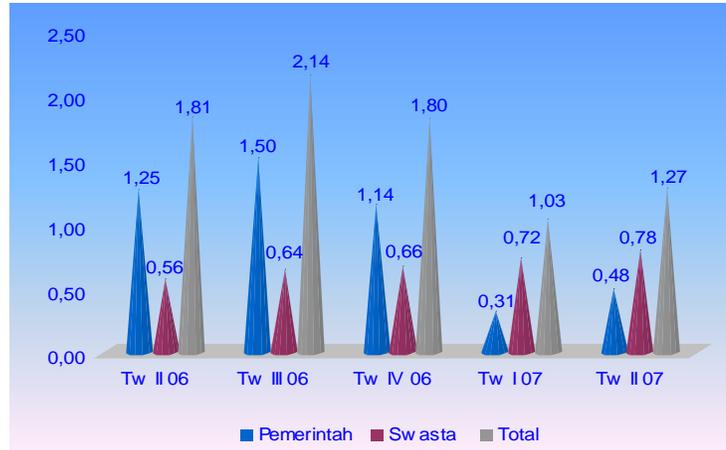
No	Kab./Kota	Lokasi Bank			Lokasi Proyek di Riau		
		Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pekanbaru	10.418.990	10.519.123	10.737.120	10.976.924	11.003.165	11.403.294
2	Bengkalis	378.192	393.854	421.201	1.190.135	1.067.299	1.366.591
3	Dumai	528.615	551.231	609.053	1.621.055	897.156	822.670
4	Indragiri Hilir	788.122	734.344	742.532	1.223.378	1.196.817	1.237.341
5	Indragiri Hulu	572.889	561.651	653.873	1.807.521	1.717.276	1.791.158
6	Lainnya	1.168.033	1.242.232	1.404.432	5.079.588	4.215.053	5.413.438
Jumlah		13.854.841	14.002.435	14.568.211	21.898.601	20.096.766	22.034.492

2.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dari Rp.1.032.895 juta menjadi Rp.1.265.437 juta atau tumbuh sebesar 22,51%. Dari jumlah tersebut, sebesar 61,73% tercatat pada kelompok bank swasta dan 38,27% pada kelompok bank pemerintah. Peningkatan jumlah *undisbursed loan* antara lain disebabkan oleh adanya sumber pembiayaan lain yang digunakan oleh masyarakat dan beberapa kendala yang dihadapi pengusaha/investor seperti ketersediaan infrastruktur dan masalah perizinan.

Bila dilihat dari jenis penggunaannya, 92,67% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit modal kerja, sementara kredit investasi dan konsumsi masing-masing mencapai 6,41% dan 0,92% dari total kredit yang belum ditarik. Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi 38,67% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit kepada sektor perdagangan. Sektor lain yang mempunyai kelonggaran tarik cukup besar adalah sektor pertanian, jasa dan konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar 25,54%, 15,89% dan 9,09% dari total kredit yang belum ditarik.

Grafik 3.4. Jumlah Undisbursed Loan Perbankan Propinsi Riau



Kondisi ekonomi makro yang semakin kondusif pada triwulan laporan mendorong peningkatan jumlah persetujuan kredit selama triwulan laporan yaitu mencapai Rp.2.081.577 juta atau meningkat 13,42% dibandingkan dengan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang mencapai 18,70%, sementara kredit investasi dan konsumsi masing-masing tumbuh 9,96% dan 11,17%.

Tabel 3.6. Persetujuan Kredit Baru Di Propinsi Riau

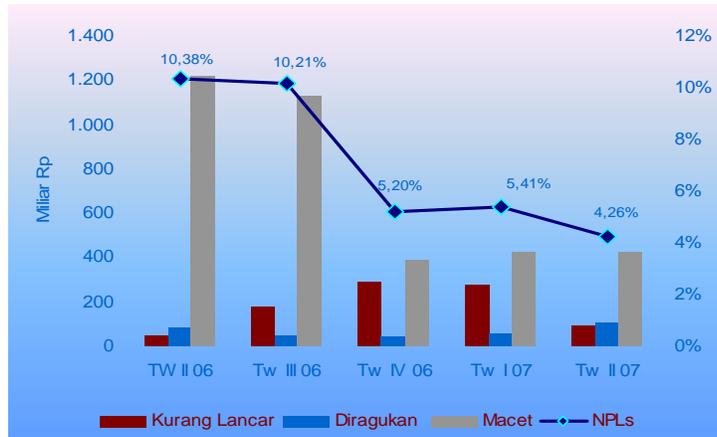
Jenis Kredit	Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07	
	Rp. Juta	%								
1. Modal Kerja	443.053	32,66	495.053	31,51	819.377	47,12	615.992	33,56	731.207	35,13
2. Investasi	240.130	17,70	457.743	29,13	356.390	20,50	422.917	23,04	465.041	22,34
3. Konsumsi	673.489	49,64	618.546	39,36	563.047	32,38	796.350	43,39	885.329	42,53
Jumlah	1.356.672	100	1.571.342	100	1.738.814	100	1.835.259	100	2.081.577	100

2.1.3.4. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari turunnya rasio *Non Performing Loans* (NPLs) dari 5,41% menjadi 4,26%, dan bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,38%. Trend penurunan NPLs sudah berlangsung sejak Triwulan III - 2006 sebagai hasil dari beberapa upaya yang dilakukan perbankan baik melalui penagihan yang intensif maupun restrukturisasi kredit. Bila pembentukan pencadangan aktiva produktif

diperhitungkan dalam rasio NPLs, maka rasio *NPLs net*¹ perbankan pada triwulan laporan sebesar 3,11%.

Grafik 3.5. Perkembangan NPLs Gross Di Propinsi Riau



Berdasarkan sektor yang dibiayai, sektor konstruksi mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 18,14%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 19,32%. Sementara sektor listrik, gas dan air yang pada triwulan sebelumnya mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 22,30%, maka pada triwulan laporan mengalami perbaikan NPLs menjadi sebesar 15,35%. Mengingat pangsa kredit pada sektor ini relatif kecil (0,003%), maka tingginya prosentase NPLs pada sektor ini tidak terlalu mempengaruhi kualitas kredit secara keseluruhan. Sementara itu, NPLs terendah adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 0,71%, mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya.

Tabel 3.7. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Propinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pertanian	3,66%	2,44%	5,61%	5,73%	3,47%
2	Pertambangan	0,00%	0,00%	11,38%	10,19%	0,71%
3	Perindustrian	46,27%	48,76%	7,55%	8,34%	1,35%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	0,00%	22,30%	15,35%
5	Konstruksi	12,18%	16,73%	18,90%	19,32%	18,14%
6	Perdag., Resto. & Hotel	8,55%	6,63%	5,56%	5,98%	5,79%
7	Pengangkutan, Pergud.	1,16%	2,27%	1,62%	2,18%	5,49%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	3,66%	3,46%	3,37%	3,88%	6,21%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	11,59%	10,39%	11,93%	11,90%	12,90%
10	Lain-lain	2,10%	2,24%	2,25%	2,24%	2,54%

¹ Jumlah kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet – dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk kredit KL, D, M – dibagi total kredit.

Berdasarkan penyebarannya, rasio NPLs tertinggi terdapat pada kota Bengkalis, yang mencapai 6,31%, mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang hanya tercatat 1,36%, diikuti kota Pekanbaru yang mencapai 4,80% atau mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya, kota Dumai, kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Indragiri Hulu yang masing-masing tercatat sebesar 2,14%, 1,88%. dan 0,85%.

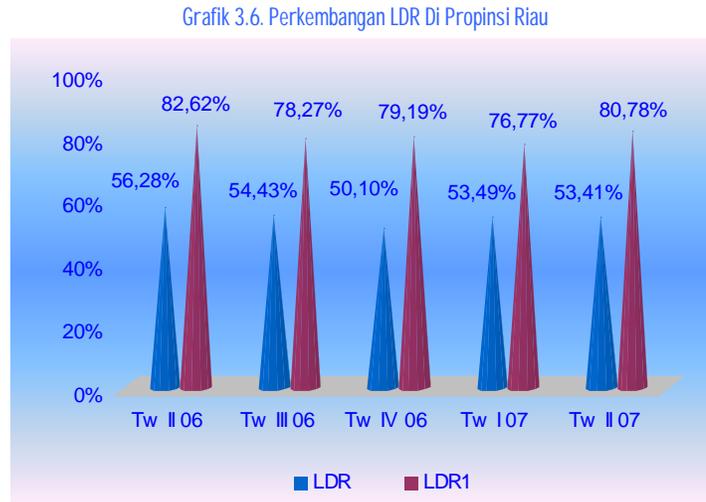
Tabel 3.8. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten
Di Propinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pekanbaru	12,99%	12,89%	4,07%	4,52%	4,80%
2	Dumai	0,77%	1,53%	5,87%	5,79%	2,14%
3	Bengkalis	5,48%	5,62%	0,80%	1,36%	6,31%
4	Indragiri Hulu	0,66%	0,85%	2,22%	2,17%	0,85%
5	Indragiri Hilir	2,49%	2,61%	30,66%	29,98%	1,88%
6	Lainnya	1,08%	0,70%	0,61%	1,03%	2,78%

2.1.4. Intermediasi Perbankan

2.1.4.1. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan terjadi peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp.1.098.746 (4,26%) dari Rp.26.179.487 juta menjadi Rp.27.278.233 juta. Berdasarkan kepemilikan peningkatan tersebut terjadi baik pada dana milik pemerintah daerah maupun dana milik perorangan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit sehingga menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau pada periode laporan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 53,49% menjadi 53,41%. Namun demikian, jika jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di luar Propinsi Riau untuk membiayai proyek di Riau turut diperhitungkan, maka LDR mencapai 80,78% atau meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 76,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara total penyaluran kredit perbankan di propinsi Riau sudah cukup tinggi, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan LDR nasional yang mencapai 66,3%.



Ket : LDR1 = rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK

2.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp.10.044.830 juta, meningkat 11,13% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada triwulan laporan. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan propinsi Riau mencapai 68,95%. Kondisi ini merupakan indikasi adanya potensi dan kepedulian perbankan dalam pengembangan UMKM.

Menurut jenis penggunaan, sebesar 53,90% dari total pembiayaan kepada UMKM digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi) dan sisanya untuk pembiayaan konsumsi. Pembiayaan kepada sektor produktif ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 52,86%, sedangkan pangsa kredit konsumsi menunjukkan penurunan.

Tabel 3.9. Perkembangan Kredit UMKM di Propinsi Riau

Plafon	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
	(Rp. Juta)				
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	3.152.811	3.218.001	3.370.785	3.417.303	3.713.768
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	2.536.701	2.828.557	2.999.749	3.177.459	3.667.609
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	2.220.703	2.260.357	2.362.892	2.443.806	2.663.453
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	5.195.326	4.996.123	5.121.415	4.963.867	4.523.381
Total Kredit	13.105.541	13.303.038	13.854.841	14.002.435	14.568.211
Total Kredit UMKM	7.910.215	8.306.915	8.733.426	9.038.568	10.044.830
(% terhadap Total Kredit)	60,36%	62,44%	63,04%	64,55%	68,95%

Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, sektor perdagangan mempunyai pangsa terbesar yaitu mencapai 25,37%, diikuti sektor pertanian sebesar 12,51%, sektor jasa 8,36%, sektor konstruksi 3,30%, perindustrian 2,19%, pengangkutan 1,72% dan pertambangan 0,04%, sementara sektor lain-lain mencapai 46,48%. Sektor listrik, gas dan air merupakan sektor yang paling kecil jumlahnya yaitu 0,004%.

Kualitas kredit UMKM mengalami penurunan yang tercermin dari kenaikan rasio NPLs terhadap total kredit UMKM dari 3,28% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,67% pada triwulan laporan. Penurunan kualitas kredit terjadi di beberapa sektor usaha yaitu sektor konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa dunia usaha, dan sektor lain-lain yang masing-masing menjadi 9,60%, 4,01%, 2,93%, 4,52%, 2,61%. Sementara NPLs sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, Listrik, gas dan air, dan jasa sosial masyarakat mengalami peningkatan kualitas. NPLs tertinggi pada triwulan laporan dialami oleh sektor jasa sosial, namun mengalami sedikit peningkatan kualitas bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 16,30%.

Tabel 3.10. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pertanian	3,08%	3,35%	2,80%	4,01%	3,85%
2	Pertambangan	0,00%	0,00%	11,38%	10,19%	3,23%
3	Perindustrian	12,94%	14,54%	5,86%	8,55%	7,43%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	0,00%	22,30%	15,35%
5	Konstruksi	12,39%	9,36%	8,92%	9,22%	9,60%
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,39%	3,36%	3,22%	3,67%	4,01%
7	Pengangkutan, Pergud.	1,76%	3,34%	2,41%	2,92%	2,93%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	2,36%	2,25%	1,73%	2,41%	4,52%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	16,61%	13,24%	16,63%	16,30%	16,08%
10	Lain-lain	2,08%	2,23%	2,31%	2,30%	2,61%

Bila dilihat dari penyebarannya, maka dalam triwulan laporan NPLs UMKM tertinggi masih tercatat di kota Dumai, yaitu mencapai 6,79%, mengalami penurunan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya, berbeda dengan NPLs secara keseluruhan, dimana kota Dumai menjadi salah satu yang mempunyai NPLs terendah. Sedangkan NPLs terendah juga masih tercatat di kabupaten Indragiri Hulu yang tercatat 0,93%, namun NPLs pada kabupaten ini mengalami perbaikan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan kualitas kredit UMKM terjadi hampir di semua kota/kabupaten, kecuali di kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 3.11. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Propinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pekanbaru	3,79%	3,85%	3,13%	3,91%	4,02%
3	Bengkalis	5,97%	1,53%	0,80%	1,36%	2,17%
2	Dumai	0,77%	6,13%	6,46%	6,37%	6,79%
5	Indragiri Hilir	1,25%	2,12%	0,85%	1,35%	1,77%
4	Indragiri Hulu	1,72%	1,42%	0,47%	1,04%	0,93%
6	Lainnya	1,08%	0,70%	2,11%	1,03%	2,78%

2.1.5. Kondisi Likuiditas

Peningkatan dana pihak ketiga didominasi oleh peningkatan dana jangka pendek sebesar 4,27%, sementara dana jangka panjang mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Di sisi lain, alat likuid perbankan berupa kas dan SBI mengalami penurunan sebesar 1,24% yang disebabkan oleh penurunan SBI perbankan meskipun kas perbankan mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan menurunnya kondisi likuiditas perbankan Riau, tetapi masih dalam batas aman.

2.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga

Posisi Dana Pihak Ketiga dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.27.278.233 juta, naik sebesar Rp.1.098.746 juta (4,20%) dari DPK triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.26.179.487 juta. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di Propinsi Riau.

Tabel 3.12. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Propinsi Riau (Miliar Rp)

	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
Jangka Pendek					
- Giro	9.729	10.330	12.166	11.166	11.002
- Tabungan	6.966	7.299	9.157	8.625	9.124
- Deposito (sd 3 bln)	6.070	6.114	5.700	5.796	6.553
Total	22.766	23.742	27.023	25.586	26.679
Jangka Menengah dan Panjang					
- Deposito 3-6 bln	193	209	223	272	312
- Deposito 6-12 bln	240	233	234	218	267
- Deposito > 12 bln	86	75	167	103	21
Total	519	517	625	593	600
Total DPK	23.285	24.259	27.648	26.179	27.278

Penurunan DPK hanya terjadi pada komponen giro, sedangkan tabungan dan deposito secara total mengalami peningkatan, namun demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan pada deposito berjangka waktu panjang (lebih dari 12 bulan). Komponen giro turun sebesar Rp.163.959 juta (1,47%) menjadi Rp.11.001.581 juta, sementara tabungan naik sebesar Rp.499.208 juta (5,79%) menjadi Rp.9.124.466 juta, dan deposito mengalami peningkatan tertinggi yaitu 11,95% menjadi Rp.7.152.186 juta. Dengan perkembangan tersebut maka pangsa DPK jangka pendek terhadap total DPK mengalami sedikit peningkatan dari 97,73% pada triwulan sebelumnya menjadi 97,80% pada triwulan laporan.

Berdasarkan kepemilikannya, dalam triwulan laporan kepemilikan DPK masih tetap didominasi oleh nasabah perorangan dengan pangsa 53,25% dari total DPK, diikuti dengan nasabah pemerintah daerah dengan pangsa 32,17%. Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada kepemilikan dana Badan Usaha Milik Daerah, yang mengalami peningkatan sebesar 210,33%, namun hanya memiliki pangsa 0,17% dari total DPK.

Tabel 3.13. Sebaran DPK menurut kepemilikan di Propinsi Riau (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kepemilikan	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1	Pemerintah Pusat	123.459	77.170	332.244	146.652	129.184
2	Pemerintah Daerah	8.208.857	7.988.156	8.810.308	8.717.756	8.775.944
3	Badan/ Lembaga Pemerintah	159.024	305.303	283.123	262.742	106.510
4	Badan Usaha Milik Negara	230.842	173.289	298.184	188.739	294.488
5	Badan Usaha Milik Daerah	10.496	23.398	31.091	14.738	45.737
6	Perusahaan Asuransi	135.892	111.515	176.575	215.061	255.689
7	Perusahaan Swasta	2.145.815	1.814.267	2.571.259	2.013.415	2.439.163
8	Yayasan dan Badan Sosial	105.334	106.550	168.372	221.694	157.779
9	Koperasi	116.851	134.047	239.056	319.939	181.070
10	Perorangan	11.700.691	13.166.617	14.298.921	13.714.750	14.524.592
11	Lainnya	338.903	345.788	430.730	348.934	355.559
12	Bukan Penduduk	9.019	13.078	13.616	15.067	12.518

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih ditempati oleh kota Pekanbaru sebesar 55,41%, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 11,11% dan 6,29%. Peningkatan DPK terjadi hampir di semua kota/kabupaten. Peningkatan terbesar terjadi di kabupaten Indragiri Hulu yang naik sebesar 10,95%, namun peningkatan Dana Pihak Ketiga di dominasi oleh kota Pekanbaru (97,16%).

Tabel 3.14. Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten Di Propinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07	
		Rp. Juta	%								
1	Pekanbaru	12.699.119	54,54	13.198.185	54,40	14.730.699	53,27	14.046.210	53,65	15.113.767	55,41
3	Bengkalis	2.181.323	9,37	2.250.252	9,28	3.013.455	10,90	2.911.756	11,12	3.029.624	11,11
2	Dumai	1.485.656	6,38	1.494.088	6,16	1.741.626	6,30	1.656.496	6,33	1.715.305	6,29
5	Indragiri Hilir	919.221	3,95	1.005.082	4,14	882.450	3,19	872.256	3,33	928.644	3,40
4	Indragiri Hulu	870.757	3,74	883.115	3,64	1.258.673	4,55	1.067.302	4,08	1.184.178	4,34
6	Lainnya	5.129.107	22,03	5.428.456	22,38	6.026.576	21,79	5.625.467	21,49	5.306.715	19,45
	Jumlah	23.285.183	100,00	24.259.178	100,00	27.653.479	100,00	26.179.487	100,00	27.278.233	100,00

Tabel 3.15. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal Di Propinsi Riau

Klasifikasi	Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07	
	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)								
< Rp.1 juta	943.009	534.297	836.334	486.133	924.735	535.087	979.642	568.694	915.527	506.584
Rp.1 juta s.d. <Rp.10 juta	192.589	449.302	292.597	880.727	211.177	552.782	203.330	560.285	280.824	721.713
Rp.10 juta s.d. <Rp.50 juta	173.849	3.920.958	160.701	3.559.186	180.830	4.085.182	185.332	4.295.640	182.495	3.897.581
Rp.50 juta s.d. <Rp.100 juta	13.067	911.367	12.679	859.975	29.786	2.135.710	20.802	1.597.840	22.776	1.713.674
Rp.100 juta s.d. <Rp.250 juta	17.228	2.852.672	19.322	3.204.668	21.599	3.483.208	19.659	3.256.087	22.587	3.845.683
Rp.250 juta s.d. <Rp.1.000 juta	5.529	2.432.406	6.144	2.605.402	6.719	2.975.907	5.992	2.751.411	5.722	2.651.695
Rp.1.000 juta s.d. <Rp.10.000 juta	1.723	5.505.517	1.738	4.696.283	2.111	5.049.046	1.782	4.424.235	2.055	5.310.013
>=Rp.10.000 juta	255	6.678.664	264	7.966.804	164	8.836.557	150	8.715.915	169	8.631.290
Total	1.347.249	23.285.183	1.329.779	24.259.178	1.377.121	27.653.479	1.416.689	26.170.107	1.432.155	27.278.233

Dalam triwulan laporan, jumlah rekening DPK bertambah dari 1.416.689 rekening menjadi 1.432.155 rekening. Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada rekening DPK dengan nominal saldo Rp.1 juta sampai dengan Rp.10 juta, yang meningkat sekitar 77.494 rekening, sedangkan pada rekening DPK dengan saldo 10 juta – 50 juta rupiah terjadi penurunan terbesar yaitu 2.837 rekening. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mulai menabung di perbankan seiring dengan semakin pulihnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Sementara itu, secara nominal penambahan terbesar terjadi pada nominal Rp 1.000 juta sampai dengan Rp.10.000 juta dan pengurangan terbesar terjadi pada nominal Rp.10 juta sampai dengan Rp.50 juta.

2.1.5.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan propinsi Riau sebesar Rp.7.589.823 juta turun 1,24% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan penurunan pada komponen SBI sementara komponen kas mengalami peningkatan. Di sisi lain jumlah *Non Core Deposit* (NCD)² perbankan propinsi Riau juga meningkat sebesar 4,27% dari Rp.7.675.939 juta menjadi Rp.8.003.609 juta. Penurunan hanya terjadi pada komponen giro yang turun sebesar 1,47% sementara tabungan dan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan masing-masing tumbuh sebesar 5,79% dan 13,06%

Tabel 3.16. Perkembangan Alat Likuid dan Non Core Deposit

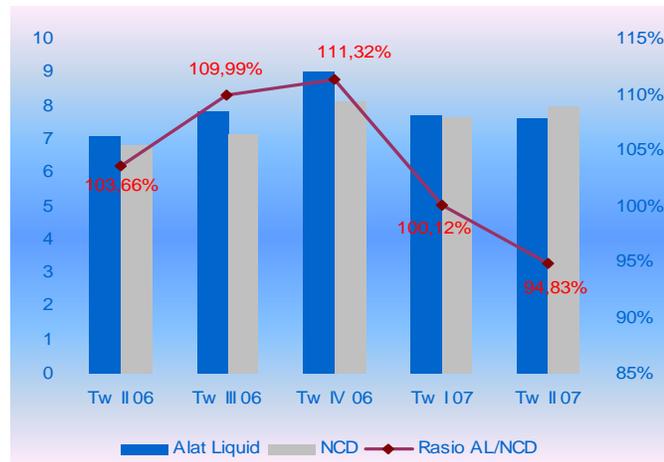
Alat Likuid	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
Kas	460.588	487.409	768.834	576.120	671.645
SBI	6.618.828	7.346.871	8.255.746	7.108.831	6.918.178
Alat Likuid	7.079.416	7.834.280	9.024.580	7.684.951	7.589.823
Alat Likuid	7,08	7,83	9,02	7,68	7,59

Non Core Deposit (NCD)	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
Giro (30%)	2.918.772	3.098.887	3.649.679	3.349.662	3.300.474
Tabungan (30%)	2.089.928	2.189.554	2.747.231	2.587.577	2.737.340
Dep 1-3 bln (30%)	1.821.071	1.834.165	1.710.041	1.738.700	1.965.795
NCD	6.829.771	7.122.606	8.106.952	7.675.939	8.003.609
NCD	6,83	7,12	8,11	7,68	8,00

Dengan perkembangan tersebut maka rasio Alat Likuid terhadap NCD mengalami penurunan dari 100,12% menjadi 94,83%, yang mengindikasikan turunnya kondisi likuiditas perbankan di propinsi Riau. Sepanjang tahun 2006, rasio ini terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan sejak awal triwulan 2007 sampai dengan triwulan II - 2007, terutama karena menurunnya penanaman dalam bentuk SBI. Walaupun terjadi penurunan, namun rasio tersebut masih cukup aman.

² Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit



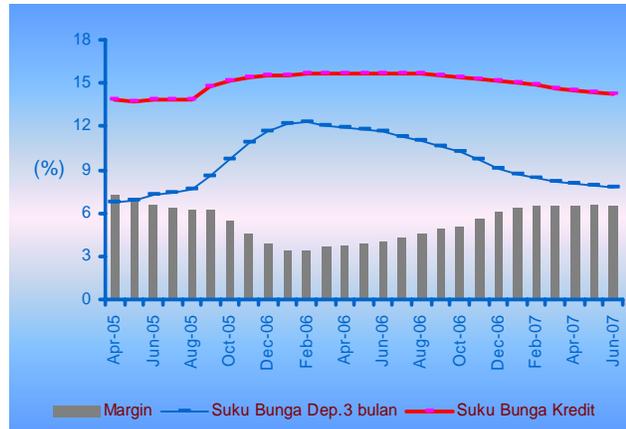
2.1.6. Profitabilitas

Kondisi profitabilitas perbankan propinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit perbankan dan menurunnya jumlah beban operasional perbankan dibandingkan triwulan sebelumnya karena menurunnya suku bunga deposito sementara margin yang dinikmati oleh perbankan relatif tetap.

2.1.6.1. Spread Bunga

Stabilitas ekonomi makro yang relatif terjaga yang ditandai dengan beberapa indikator seperti kecenderungan menguatnya nilai tukar dan inflasi yang terjaga, serta optimisme kalangan dunia usaha terhadap perbaikan kondisi perekonomian membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga BI rate-nya. Selama triwulan laporan BI rate telah mengalami penurunan sebanyak 50 *basis points* (bps), yaitu dari 9,00% pada Maret 2007, menjadi 8,75% pada Mei 2007 dan 8,50% pada Juni 2007. Kalangan perbankan merespon kebijakan ini dengan menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 36 bps, dari 8,13% pada akhir Tw I 2007 menjadi 7,77% pada Tw II 2007. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) turun sebesar 37 bps dari 14,66% pada akhir Tw I 2007 menjadi 14,29% pada Tw II 2007. Dengan demikian *spread* yang dinikmati perbankan pada triwulan laporan sebesar 6,52%, mengalami sangat sedikit penurunan bila dibandingkan dengan *spread* pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,53%.

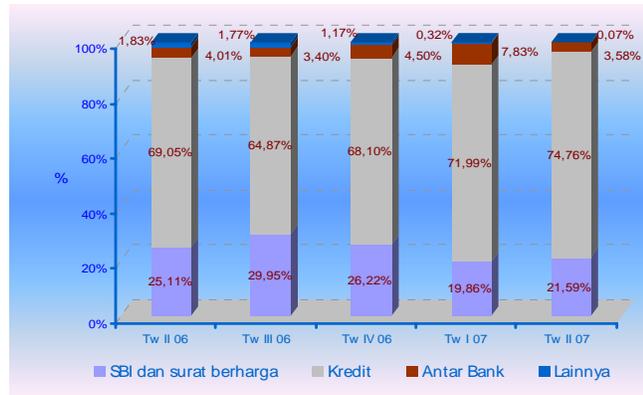
Grifik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito



2.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Selama triwulan laporan, perbankan propinsi Riau mencatat pendapatan bunga sebesar Rp.683.419 juta, mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan pendapatan bunga pada triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp.680.764 juta (0,39%), dan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp.679.075 juta, sehingga sampai dengan triwulan II – 2007 tercatat memperoleh pendapatan sebesar Rp.1.364.183 juta. Hal ini dipicu oleh naiknya pendapatan bunga dari penempatan surat berharga dan pendapatan kredit seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Sementara itu, pendapatan antar bank dan pendapatan bunga lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar 54,08% dan 78,50%, namun masih dapat dikompensasi oleh meningkatnya pendapatan bunga kredit dan surat berharga karena pangsa yang kecil. Peningkatan pendapatan bunga kredit ini juga sebagai akibat dari menurunnya nominal kredit non lancar pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga



Di sisi lain, beban bunga yang dikeluarkan perbankan juga mengalami penurunan sebesar 4,35% selama triwulan laporan, dari Rp. 338.223 juta menjadi Rp. 323.510 juta, yang dipicu oleh penurunan beban bunga untuk Dana Pihak Ketiga. Pembayaran bunga untuk dana pihak ketiga mencapai 95,12% dari total pembayaran bunga yang dibayarkan oleh perbankan, sehingga jumlah dana pihak ketiga cukup mempengaruhi beban bunga yang dikeluarkan perbankan. Penurunan beban bunga terhadap dana pihak ketiga dipicu oleh penurunan beban bunga tabungan dan giro. Secara persentase penurunan beban bunga tertinggi terjadi pada beban bunga antar bank, yang mengalami penurunan sebesar 36,56%, namun tidak terlalu membawa pengaruh yang signifikan, karena hanya mempunyai komposisi sebesar 0,69% terhadap total beban bunga.

Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga

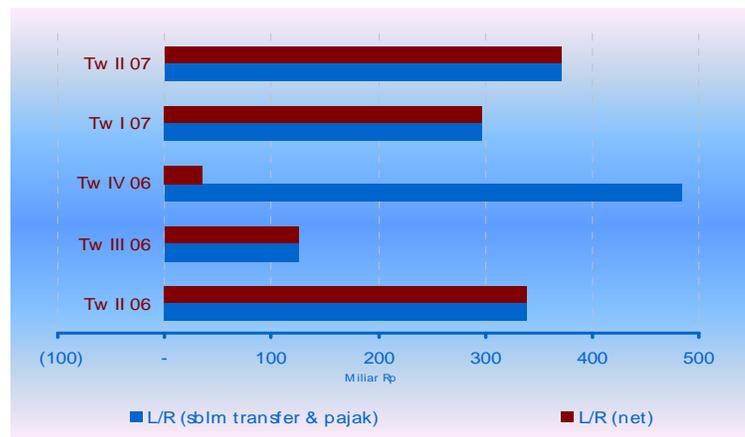


Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga yang diterima oleh bank dan menurunnya beban bunga, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan propinsi Riau pada triwulan laporan juga meningkat dari Rp. 342.541 juta pada triwulan sebelumnya menjadi Rp. 359.909 juta pada triwulan laporan atau meningkat 5,07%.

2.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan perbankan Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp.371.212 juta, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan laba periode sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar Rp.298.108 (24,52%) juta dan Rp.339.647 (9,29%). Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit dan masih tingginya margin bunga yang dinikmati oleh perbankan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dari 3,66% menjadi 6,53%.

Grafik 3.11. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)



2.2. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Aset BPR meningkat 6,31% menjadi 319,09 miliar, peningkatan aset didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp.211,86 miliar atau sebesar 5,30% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan laporan kredit tumbuh 8,05% dari Rp.184,46 miliar menjadi Rp.199,30 miliar. Namun, sejalan dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, kualitas kredit juga mengalami penurunan yang terlihat dari meningkatnya rasio NPLs terhadap total kredit dari 7,93% menjadi 8,49%. Peningkatan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada dana pihak ketiga, menyebabkan naiknya angka LDR BPR dari 91,68 menjadi 94,07%

Membaiknya kondisi ekonomi di propinsi Riau, mendorong pertumbuhan kantor Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau, yang pada triwulan laporan bertambah sebanyak 1 kantor. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2007 BPR dipropinsi Riau akan mencapai 27 kantor.

Tabel 3.17. Perkembangan Usaha BPR/BPRS
Di Propinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Periode					Δ
	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	
1. Jumlah BPR/S	15	15	15	15	16	1
2. Asset	281,44	280,12	277,69	300,16	319,09	6,31%
3. DPK	208,78	184,38	187,43	201,19	211,86	5,30%
4. Kredit	150,50	166,55	168,74	184,46	199,30	8,05%
5. NPL (nominal)	12,47	15,13	12,09	14,62	16,91	15,69%
LDR (%)	72,08	90,33	90,02	91,68	94,07	0,03
NPLs (%)	8,28	9,08	7,16	7,93	8,49	0,07

Dilihat dari beberapa indikator, kinerja BPR di Propinsi Riau pada triwulan laporan masih masih relatif sama dengan triwulan sebelumnya BPR dengan CAR >20% sebanyak 13 BPR, sedangkan BPR dengan ROA < 1 berkurang 1 BPR dan ROA 1 – 5 bertambah 1 BPR.

Tabel 3.18. Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS
Di Propinsi Riau

Keterangan	Jumlah BPR/BPRS				
	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1. CAR (%)					
a. 1 s.d. < 10	0	1	0	0	0
b. 10 s.d. < 20	6	8	1	2	2
c. >= 20	9	6	14	13	13
2. ROA (%)					
a. < 1	5	6	5	5	4
b. 1 - 5	7	6	8	6	7
c. > 5	3	3	2	4	4

2.3. Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah pada triwulan laporan tetap menunjukkan perkembangan semakin membaik dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Dengan jumlah kelembagaan yang masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu 5 bank yang terdiri dari 2 bank syariah dan 3 Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah
Di Propinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Periode				
	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07
1. Jumlah	5	5	5	5	5
2. Asset	610,23	591,26	622,35	701,64	790,39
3. DPK	328,01	344,32	456,04	449,63	500,18
4. Pembiayaan	448,79	460,09	476,60	468,13	553,25
5. Nominal NPF	17,72	17,72	19,77	24,27	22,99
6. NPF	3,95%	3,85%	4,15%	5,19%	4,16%
7. FDR	136,82%	133,62%	104,51%	104,11%	110,61%

Bank Syariah dan UUS

Total aset perbankan syariah pada triwulan laporan tumbuh 12,65% menjadi Rp.790,39 miliar. Peningkatan aset ini disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar 11,24%. Meningkatnya DPK diimbangi juga dengan peningkatan pembiayaan yang cukup tinggi yaitu tumbuh 18,18% menjadi Rp.553,25 miliar. Seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat, pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit berdampak pada peningkatan FDR syariah dari 104,11% menjadi 110,61%.

Dilihat dari sektor yang dibiayai 39,31% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa dunia usaha, 20,85% untuk sektor lainnya (konsumsi) dan 17,01% untuk sektor pertanian. Kualitas pembiayaan pada akhir triwulan laporan meningkat bila dibandingkan dengan kualitas pembiayaan pada triwulan sebelumnya, yang terlihat dari penurunan rasio Non Performing Financing (NPFs) terhadap total pembiayaan dari 5,19% menjadi 4,16%. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada triwulan laporan tercatat sebesar 110,61%, lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 104,11%, lebih besar bila dibandingkan dengan rasio LDR pada bank konvensional maupun BPR.

3. Perkembangan Sistem Pembayaran

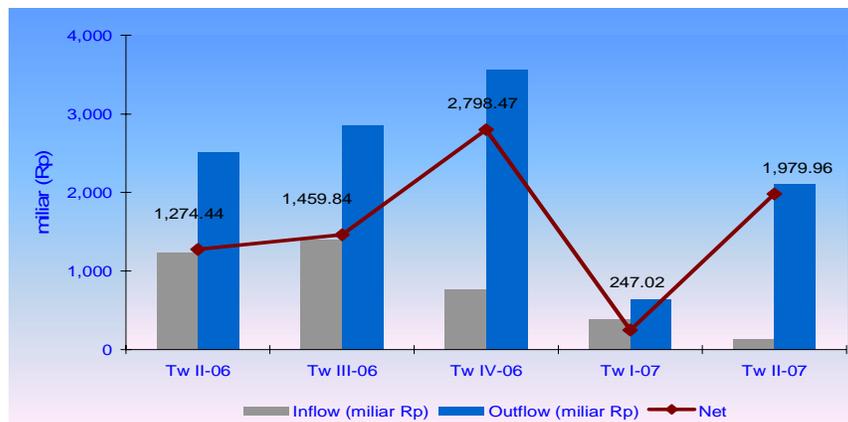
Kebutuhan masyarakat terhadap alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) pada triwulan II – 2007 mengalami peningkatan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah *outflow* dari Bank Indonesia, sedangkan jumlah uang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) mengalami penurunan. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yaitu bank hanya diperkenankan melakukan penyetoran terhadap uang yang tidak layak edar (UTLE) ke Bank Indonesia. Sementara itu, kegiatan pembayaran non tunai baik transaksi kliring maupun *BI-RTGS* pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai

3.1.1 Aliran uang masuk/keluar

Dalam triwulan laporan, aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru meningkat sebesar 230,83 % dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni dari Rp 637,70 miliar menjadi Rp 2.109,73 miliar . Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang kartal terutama terkait dengan libur sekolah dan mulai direlisasikannya belanja pembangunan daerah. Sementara itu uang yang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*) mengalami penurunan dari Rp390,68 miliar menjadi Rp129,77 miliar atau turun 66,78 % dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini terjadi sejalan dengan diterapkannya kebijakan uji coba setoran dan bayaran, dimana bank hanya diperkenankan melakukan penyetoran terhadap uang yang tidak layak edar (UTLE) ke Bank Indonesia untuk seluruh pecahan. Dengan kondisi tersebut, maka *net outflow* pada triwulan II-2007 mencapai Rp 1.979,96 miliar atau naik 701,54% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp 247,02 miliar.

Grafik 3.12. Perkembangan Kas Inflow dan Outflow



3.1.2. Penyediaan uang kartal layak edar

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang yang tidak layak edar baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang. Dalam triwulan laporan, jumlah uang kertas yang di PTTB di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp120,41 miliar atau 92,79 % dari jumlah uang yang masuk (*Inflow*), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 94,16 miliar atau 24,10 % dari jumlah uang yang masuk. Meningkatnya presentase uang yang di PTTB terhadap uang yang masuk menunjukkan bahwa sebagian besar setoran bank adalah UTLE.

Selain itu, secara rutin dilakukan kegiatan penukaran uang meliputi : (i) pelayanan penukaran uang lusuh atau rusak yang diselenggarakan pada setiap hari Selasa; (ii) pelayanan penukaran uang pecahan kecil yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis; dan (iii) kegiatan kas keliling atau pelayanan kas yang dilakukan di luar Kantor Bank Indonesia baik di kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Pada triwulan laporan telah dilaksanakan kegiatan kas keliling di Tembilahan dan Duri dengan jumlah penukaran mencapai Rp 1,05 miliar. Sementara di kota Pekanbaru kegiatan penukaran dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia dengan jumlah penukaran mencapai Rp 10,17 miliar.

3.1.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia Pekanbaru dari setoran bank umum pada triwulan laporan tercatat sebanyak 17 lembar, atau 0,0002% dari jumlah lembar uang kertas yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia, yang berarti dalam setiap 1 juta lembar uang yang masuk terdapat 2 lembar uang palsu. Jumlah lembar (bilyet) temuan uang palsu pada triwulan laporan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 22 lembar.

Untuk mengurangi peredaran uang palsu, KBI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah secara langsung kepada masyarakat. Pada triwulan laporan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kota Pekanbaru.

3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai

3.2.1. Kliring

Aktivitas transaksi pembayaran non tunai melalui sistem kliring pada triwulan laporan dari sisi warkat meningkat di bandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 234.408 lembar menjadi 235.998 lembar atau naik 1.090 lembar (0,5%), sedangkan jumlah nominal kliring menurun Rp9.758 juta (0,21%) dari Rp4.572.287 juta menjadi Rp 4.562.529 juta

Tabel 3.20. Perkembangan Kliring di Provinsi Riau
(dalam juta rupiah)

Keterangan	Jumlah Warkat		Jumlah Harian		Tolakan Harian	
	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (%)	Nominal (%)
Tw II 06	282,747	4,598,297	4,560	74,166	0.69	0.82
Tw III 06	259,144	4,585,400	4,113	72,784	0.81	0.99
Tw IV 06	216,919	4,206,505	3,615	70,108	0.95	0.71
Tw I 07	234,908	4,572,287	3,670	71,442	0.71	0.60
Tw.II 07	235,998	4,562,529	3,806	73,589	0.65	0.52

Sementara itu, persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong perhari pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jumlah warkat tolakan cek dan bilyet giro kosong pada triwulan laporan tercatat 0,65% sedangkan berdasarkan nominal sebesar 0,52%.

3.2.2. Transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI RTGS)* di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam triwulan laporan secara total (masuk dan keluar) menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam triwulan laporan total transaksi RTGS mencapai Rp 67,64 triliun, turun 41,62% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 115,87 triliun. Transfer masuk ke Propinsi Riau turun Rp 25,47 triliun (36,07%) dari Rp 70,62 triliun menjadi Rp 45,15 triliun dan transfer keluar Propinsi Riau turun Rp 22,76 triliun (50,30 %) dari Rp 45,25 triliun menjadi Rp 22,49 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan II - 2006) jumlah transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6,28 triliun (10,21%). Secara umum transaksi RTGS masih mencatat terjadinya net inflow, yang mencerminkan besarnya dana masuk ke Propinsi Riau

Tabel 3.21. Perkembangan Transaksi RTGS
(Dalam Miliar)

Keterangan	Kumulatif Triwulanan		Rata-rata Harian	
	Dari	Ke	Dari	Ke
Tw II 06	21,688.83	39,679.78	349.82	639.99
Tw III 06	21,973.21	46,747.90	348.78	742.03
Tw IV 06	29,593.11	60,395.59	485.13	990.09
Tw.I 07	45,252.09	70,619.40	707.06	1,103.43
Trw.II.07	22,489.45	45,146.64	362.73	728.17

3.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Pedagang Valuta Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Pekanbaru hingga triwulan laporan tercatat 18 perusahaan. Berdasarkan data dari 18 Pedagang Valuta Asing tersebut, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) pada periode laporan mencapai USD 3.216 ribu atau meningkat sebesar USD 44 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.172 ribu. Sementara itu nilai penjualan, pada periode laporan mencapai USD 3.241 ribu atau naik sebesar USD 45 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.196 ribu.

Tabel 3.22. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Keterangan	Pembelian (Dlm ribu USD)	Penjualan Dlm Ribu USD
TW III 06	2,705.55	2,767.71
TW IV 06	2,799.00	2,835.00
TW I 07	3,172.00	3,196.00
TW II 07	3,216.00	3,241.00

3.4. Strategi *Cash Centre* Di Indonesia

Implementasi jangka pendek terhadap kebijakan penerapan *Cash Centre* yang dilaksanakan melalui kegiatan uji coba setoran dan bayaran perbankan antar bank di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Pekanbaru sejauh ini berjalan lancar. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari parameter tidak terjadinya kendala yang berarti dalam kegiatan perkasan bank dan terjadinya penurunan signifikan pada jumlah uang yang masuk ke kas Bank Indonesia yaitu dari Rp 3.90,68 miliar pada triwulan I - 2007 menjadi Rp129,77 miliar pada periode laporan.

Bab 4

PROSPEK

PEREKONOMIAN DAERAH

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Riau (year on year) selama tahun 2007 cukup pesat dengan *trend* yang terus meningkat masing-masing 6,53% pada triwulan I – 2007 dan 7,40% sampai dengan triwulan II – 2007 (tanpa migas). Angka pertumbuhan ekonomi Riau ini bahkan jauh di atas rata-rata kinerja ekonomi nasional (6% pada triwulan I – 2007 dan 6,1% sampai dengan triwulan II – 2007). Dengan asumsi terjadi percepatan realisasi APBD pada triwulan III - 2007, maka perekonomian propinsi Riau pada triwulan III – 2007 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Riau dalam triwulan III - 2007 diperkirakan akan dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah pada sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa keuangan serta listrik dan air bersih. Pada triwulan III – 2007 krisis listrik diperkirakan akan mulai teratasi jika upaya penambahan pasokan listrik ke PLN Riau sebesar 20 MW yang berasal dari PT. Riau Power dapat direalisasikan.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, permintaan eksternal yang tercermin dari peningkatan kinerja ekspor dan belanja pemerintah. Meningkatnya daya beli dan kebutuhan masyarakat dalam rangka memasuki bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri akan menjadi pendorong meningkatnya konsumsi masyarakat, sedangkan tingginya harga CPO di pasaran internasional akan menjadi pendorong peningkatan ekspor. Sementara itu, pertumbuhan investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif namun masih terbatas, karena investor yang sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan investasi di Riau masih menunggu adanya perbaikan di bidang perizinan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan air bersih.

Selain itu, perkiraan peningkatan realisasi APBD (belanja pemerintah) akan menjadi stimulus yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan dinas/lembaga terkait untuk merealisasikan APBD yang telah disetujui.

Sementara itu, sejalan dengan meningkatnya daya beli dan kebutuhan masyarakat, maka tekanan inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan terutama pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, cabe, sayur-sayuran, minyak goreng, gula, dan susu yang sebagian besar berasal dari daerah lain. Dalam rangka menjaga tekanan inflasi dalam batas yang terkendali, maka diperlukan upaya untuk memperlancar jalur distribusi barang tersebut. Selain itu juga perlu segera direalisasikan program pengadaan swasembada pangan sebagaimana direncanakan melalui program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), sehingga ketergantungan pengadaan pangan dari daerah lain dapat dikurangi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perbankan baik dari sisi kelembagaan (jaringan kantor), aset, dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit. Dana milik masyarakat diperkirakan akan tetap meningkat meskipun terdapat beberapa alternatif penanaman dana seperti Obligasi Negara Retail (ORI), sedangkan dana milik Pemda akan sedikit menurun seiring dengan meningkatnya realisasi APBD. Dalam hal penyaluran kredit, adanya penurunan BI-Rate, peningkatan realisasi APBD, dan semakin membaiknya kegiatan di beberapa sektor seperti perdagangan, pertanian, industri dan perumahan akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan.

Selanjutnya, perkembangan kegiatan pembayaran tunai dan non tunai diperkirakan akan mengalami peningkatan terkait dengan bulan Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga (inflasi) di Propinsi Riau pada triwulan III – 2007, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan realisasi APBD sehingga dapat menjadi stimulus bagi kegiatan perekonomian
2. Melakukan perbaikan ke arah terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan minat dan realisasi investasi, antara lain melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan perbaikan pelayanan

3. Mendorong perbankan untuk meningkatkan intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit baik kepada usaha berskala besar, menengah maupun kecil.
4. Mempercepat pelaksanaan revitalisasi pertanian terutama sub sektor perkebunan dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran serta pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) untuk mencapai swasembada pangan.
5. Meningkatkan koordinasi agar distribusi barang dapat berjalan lancar dan mencukupi kebutuhan.

KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP UANG TUNAI DI RIAU PADA TRIWULAN II- 2007 MENINGKAT CUKUP TINGGI

Kebutuhan masyarakat terhadap uang kertas dan uang logam (uang tunai) di propinsi Riau pada triwulan II – 2007 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini tercermin dari tingginya laju aliran kas keluar (*outflow*) yang sampai dengan triwulan laporan mencapai Rp.2.109.726 juta atau meningkat 230,83% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini merefleksikan tingginya aktivitas ekonomi dan transaksi tunai yang terjadi pada triwulan II 2007. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tersebut (uang kertas dan uang logam) terekait dengan naiknya kebutuhan belanja masyarakat untuk biaya pendidikan dan rekreasi selama masa liburan sekolah. Selain itu, adanya program pemerintah untuk melakukan pembayaran gaji ke tiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil, dan naiknya realisasi APBD di masing-masing Kabupaten/Kota, juga menjadi pendorong tingginya permintaan terhadap uang tunai.

Sementara itu, Jumlah setoran bank ke Bank Indonesia (*inflow*) relatif rendah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, dimana bank hanya diperkenankan untuk melakukan penyetoran terhadap uang yang tidak layak edar (UTLE). Jumlah nominal transaksi *inflow* yang pada triwulan II – 2007 sebesar Rp129,77 miliar, menurun sebesar Rp.260.905 miliar (66,78%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel Perkembangan Inflow Outflow
(dalam Juta Rupiah)

	Triwulan I - 2007	Triwulan II - 2007	Growth
<i>Outflow</i>	637.699	2.109.726	230,83%
<i>Inflow</i>	390.677	129.772	-66,78%
<i>Net Outflow</i>	247.022	1.979.954	701,53%

Sumber: Bank Indonesia - Pekanbaru

Meningkatnya jumlah *outflow* disatu sisi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Namun demikian disisi lain mengingat peningkatan tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumsi, maka perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah agar kondisi ini tidak berdampak besar terhadap peningkatan laju inflasi di provinsi Riau. Indikasi penggunaan uang tunai untuk kebutuhan konsumsi didukung oleh data peningkatan konsumsi dalam pembentukan PDRB dari 7,38% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi 7,64% pada triwulan II-2007 yang mencapai 48,59% dari total PDRB

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan inflasi, perlu dilakukan koordinasi antara instansi/lembaga terkait dalam rangka menjaga distribusi barang berjalan dengan lancar dan ketersediaan barang dapat terpenuhi. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak terjadi ekspektasi berlebihan yang berdampak negatif dan memberikan tekanan terhadap inflasi.

Pada triwulan III – 2007 permintaan masyarakat terhadap uang kartal (kertas dan logam) diperkirakan kembali meningkat. Hal ini sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi dalam menyongsong bulan Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta meningkatnya realisasi Belanja Pemerintah Daerah terutama untuk pembayaran proyek-proyek yang telah direncanakan dalam APBD 2007. Disamping kedua faktor di atas, perkiraan meningkatnya realisasi investasi oleh dunia usaha juga mempengaruhi peningkatan permintaan uang tunai. Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai pada di triwulan III – 2007 Kantor telah melakukan antisipasi dengan menambah persediaan uang tunai. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan uang dengan nominal di bawah Rp.10.000,00 Bank Indonesia Pekanbaru akan menambah kegiatan penukaran uang di kantor maupun di luar kantor